

LAPORAN TAHUNAN

2024

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN

KELAS II SORONG



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan atas Rahmat dan kasih sayang-Nya Laporan Tahunan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong Tahun 2024 ini telah tersusun. Dengan semangat dan kerja keras serta dukungan dari semua pihak, kami telah berhasil menyelesaikan program kegiatan pada Tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Kantor BKK Kelas II tahun 2020-2024.



Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian data dan informasi pelaksanaan kegiatan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Sorong dan diharapkan dapat dijadikan sarana untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Kinerja yang diperoleh pada tahun ini merupakan buah dari kerja keras seluruh unsur yang ada di Balai Kekarantinaan Kesehatan Sorong untuk bersama mewujudkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Tentunya selama Tahun 2024, masih ada hambatan yang belum sempat terselesaikan dan akan diperbaiki dan ditingkatkan di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga Laporan Tahunan BKK Sorong Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kita semua.

Sorong, 24 Februari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kelas II Sorong



Agung Budiono, SKM, MKM
NIP 197201291995031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I ANALISA SITUASI AWAL TAHUN	1
1.1. HAMBATAN TAHUN LALU.....	1
1.2. KELEMBAGAAN.....	2
A. Tugas Pokok dan Fungsi	3
B. Struktur Organisasi.....	4
1.3. SUMBER DAYA.....	8
A. Sumber Daya Manusia	8
B. Sarana dan Prasarana.....	9
C. Dana.....	13
BAB II TUJUAN DAN SASARAN KERJA.....	15
2.1. DASAR HUKUM	15
2.2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR	16
2.2.1 Tujuan	16
2.3.1 Sasaran dan Indikator.....	17
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN.....	19
3.1. STRATEGI PELAKSANAAN TUJUAN	19
3.2. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN	22
3.3. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN	23
BAB IV HASIL KEGIATAN.....	26
4.1 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN.....	26
4.2 SURVEILANS DAN PENINDAKAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN.....	26
4.3 PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG	32

4.4	PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN	36
4.5	PENCAPAIAN PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG KEGAWATDARURATAN DAN SITUASI KHUSUS.....	45
4.6	PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS	57
4.7	PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ADMINISTRASI DAN UMUM / DUKUNGAN MANAJEMEN	65
4.8	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	68
4.9	PENCAPAIAN KINERJA.....	68
4.10	REFORMASI BIROKRASI	69
4.11	PENGHARGAAN YANG DITERIMA	70
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1	KESIMPULAN.....	72
5.2	SARAN-SARAN.....	73

DAFTAR TABEL

Table 1. Distribusi Sarana Tanah, Gedung dan Bangunan	10
Table 2. Jenis Kendaraan Roda Empat dan Distribusinya	10
Table 3. Jenis Kendaraan Roda Dua dan Distribusinya	11
Table 4. Peralatan Teknis dan Distribusinya	12
Table 5. Perjalan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2024.....	13
Table 6. Perbandingan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2024 dan 2023.....	14
Table 7. Indikator Kinerja BKK Sorong	18
Table 8. Strategi Pelaksanaan Tujuan	19
Table 9. Daftar Fasyankes yang berada di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024.....	28
Table 10. Surveiles 10 besar penyakit di Wilker BKK Sorong Tahun 2025	28
Table 11. Jumlah Sinyal SKD KLB yang muncul di wilayah kerja.....	30
Table 12. Hasil penyelidikan Epidemiologi BKK Kelas II Sorong.....	31
Table 13. Distribusi Pengawasan Alat Angkut Tahun 2024.....	32
Table 14. Distribusi Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan ABK/Crew dari dalam negeri dan ke luar negeri Tahun 2024 di Wilker BKK Kelas II Sorong	33
Table 15. Hasil Pencapaian Kinerja BKK Sorong Tahun 2024	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. Piagam Penghargaan BKK Sorong Tahun 2024	70

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Distribusi Pegawai Per Wilayah Kerja Tahun 2024	8
Grafik 2. Distribusi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Grafik 3. Distribusi PNS Berdasarkan Jabatan.....	9
Grafik 4. Distribusi Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang Tahun 2024 BKK Kelas II Sorong.....	33
Grafik 5. Distribusi Hasil Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan PHQC, SSCEC/SSCC, P3K dan CoP di BKK Kelas II Sorong Tahun 2024.....	34
Grafik 6. Jumlah Alat Angkut yang ditemukan Adanya Vektor dan BPP.....	35
Grafik 7. Distribusi Pengawasan Keberangkatan dan Kedatangan Jenazah	36
Grafik 8. Distribusi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Higiene Sanitasi Kapal	37
Grafik 9. Pengawasan Tempat Pengolahan Pangan (TPP) di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024.....	38
Grafik 10. Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024	39
Grafik 11. Pengawasan TTU di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024	40
Grafik 12. Pengendalian Faktor Risiko Nyamuk Aedes Aegypti di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024	41
Grafik 13. Pengendalian Faktor Risiko Nyamuk Malaria di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024	42
Grafik 14. Pengendalian Faktor Risiko Vektor Lalat di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024	43
Grafik 15. Faktor Risiko Tikus yang Dikendalikan di BKK Kelas II Sorong Tahun 2024.....	44
Grafik 16. Distribusi Penerbitan ICV (International Certificate of Vaccination	45
Grafik 17. Distribusi Pemakaian Vaksin Meningitis meningococcus Tahun 2024	46
Grafik 18. Distribusi Pemakaian Vaksin Yellow Fever Tahun 2024	46
Grafik 19. Distribusi Pemakaian Vaksin Influenza Tahun 2024	47
Grafik 20. Distribusi Jumlah Kunjungan Klinik.....	47
Grafik 21. Distribusi Jumlah Kunjungan Klinik Berdasarkan Kasus Penyakit.....	48
Grafik 22. Distribusi Jumlah Pemeriksaan ABK Kapal Dalam Negeri	48
Grafik 23. Distribusi Jumlah Pemeriksaan ABK Kapal Luar Negeri	49
Grafik 24. Distribusi Jumlah Pengawasan Tiba dan Berangkat Penumpang Pesawat.....	49
Grafik 25. Distribusi Penerbitan Izin Angkut Orang Sakit	50
Grafik 26. Distribusi Skrining HIV/AIDS Berdasarkan Penemuan Kasus Positif	50
Grafik 27. Distribusi Skrining TB berdasarkan Susp.TB dan Bukan Susp TB.....	51
Grafik 28. Distribusi Skrining Malaria berdasarkan Reaktif dan Nonreaktif.....	51
Grafik 29. Distribusi Penerbitan KIR	52
Grafik 30. Distribusi Pengawasan Jumlah Penumpang Kapal/Pesawat dalam pelayanan Arus Mudik/balik Lebaran 1445 H di BKK kelas II Sorong Tahun 2024	53

Grafik 31. Distribusi Pengawasan Jumlah Penumpang Kapal/Pesawat dalam pelayanan Arus Mudik/balik Lebaran 1445 H di BKK kelas II Sorong Tahun 2024	53
Grafik 32. Distribusi Jumlah kunjungan Pasien ke Pos Kesehatan Pada Pelayanan Arus Mudik/Balik Lebaran 1445 H Di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong	54
Grafik 33. Distribusi pasien berdasarkan kejadian penyakit di pos kesehatan pada Pelayanan Arus Mudik/Balik Lebaran 1445 H Di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong	54
Grafik 34. Distribusi Pengawasan Jumlah Penumpang Kapal/Pesawat dalam pelayanan Arus Mudik/balik Natal dan Tahun Baru di BKK kelas II Sorong Tahun 2024	55
Grafik 35. Distribusi Data Jumlah Crew Pesawat/Abk kapal dalam pelayanan Arus/Mudik Natal dan Tahun Baru di BKK Kelas II Sorong	56
Grafik 36. Distribusi Jumlah kunjungan Pasien ke Pos Kesehatan Pada Pelayanan Arus Mudik/Balik Natal dan Tahun Baru di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong	56
Grafik 37. Distribusi pasien berdasarkan kejadian penyakit di pos kesehatan pada Pelayanan Arus Mudik/Balik Natal dan Tahun Baru di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong	57

BAB I

ANALISA SITUASI AWAL TAHUN

1.1. HAMBATAN TAHUN LALU

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun sebelumnya diantaranya adalah:

1. Beberapa pelabuhan di wilayah kerja BKK Sorong belum di lengkapi dengan thermal Scanner sehingga pemeriksaan suhu tubuh dilakukan secara manual.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedis yang memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kerja BKK Kelas II Sorong.
3. Sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan kesehatan lingkungan meliputi fasilitas penunjang laboratorium lingkungan dan entomologi belum memadai.
4. Belum terbentuknya forum Pelabuhan sehat di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong.
5. Kendaraan operasional ambulance tidak dimiliki oleh semua wilayah kerja BKK Kelas II Sorong, sehingga pelayanan pasien meliputi antar jemput pasien dalam rujukan dan evakuasi korban kegawat daruratan kecelakaan laut tidak maksimal.
6. Kendaraan operasional vektor yang terbatas sehingga proses distribusi petugas dan peralatan dalam rangka pengendalian vector tidak dapat berjalan dengan maksimal.
7. Frekuensi pengangkutan sampah ketempat pembuangan akhir sampah sering mengalami keterlambatan sehingga volume sampah di tempat pembuangan sampah sementara di wilayah Pelabuhan/bandara meningkat.
8. Belum meratanya distribusi SDM kesehatan diantaranya jabatan Dokter, Perawat, Epidemiologi Kesehatan, Entomologi Kesehatan dan Sanitarian di masing-masing wilayah kerja BKK Kelas II Sorong yang dapat menghambat proses deteksi dini dan respon terhadap factor risiko penyakit.
9. Masih dijumpai penolakan tindakan pengendalian vector di lingkungan buffer Pelabuhan dan bandara oleh Masyarakat sekitar.
10. Terdapat sumber factor risiko perindukan lalat seperti pasar ikan, pasar buah dengan sanitasi pengelolaan sampah yang kurang di beberapa wilayah kerja Pelabuhan/Bandara.

11. Pada TPM di wilayah kerja Pelabuhan Rakyat, Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Raja Ampat memiliki bangunan yang bersifat semi permanen sehingga berpotensi terhadap cemaran fisik, keberadaan vector dan agen biologis lainnya.
12. Belum tersedianya laboratorium kesehatan lingkungan yang terakreditasi di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong sehingga pemeriksaan sampel lingkungan tidak bisa terlaksana dengan maksimal.
13. Pelaksanaan kegiatan telah berjalan namun anggaran belum teralisasi sehingga pada capaian output muncul GAP antara realisasi output.
14. Perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi yang diakibatkan beberapa factor eksternal dan internal sehingga tidak sesuai.
15. RPK dan RPD yang disusun terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan targetnya.
16. Penyusunan dokumen perencanaan implementasi WBK pada masing-masing POKJA belum optimal
17. Pendokumentasian kegiatan belum berjalan dengan baik
18. Realisasi anggaran belanja belum sesuai dengan dokumen RPK dan RPD
19. Rendahnya partisipasi tim kerja dalam pengoptimalan anggaran belanja
20. Rendahnya peran koordinator wilayah kerja dalam mengoptimalkan anggaran kegiatan teknis

1.2. KELEMBAGAAN

Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Nomenklatur KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) berubah menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) dengan tugas pokok dan fungsi yang masih sama yaitu cegah tangkal masuknya penyakit di pintu masuk Negara. Sesuai Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
2. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
3. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II
4. Loka Kekarantinaan Kesehatan

Sesuai dengan Diktum Keempat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis

Bidang Kekarantinaan Kesehatan dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dibentuk tim kerja, untuk itu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong nomor HK.02.03/1/C.IX.5/1753/2024 tentang Tim Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari 5 (lima) Tim Kerja yaitu sebagai berikut:

1. Tim kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

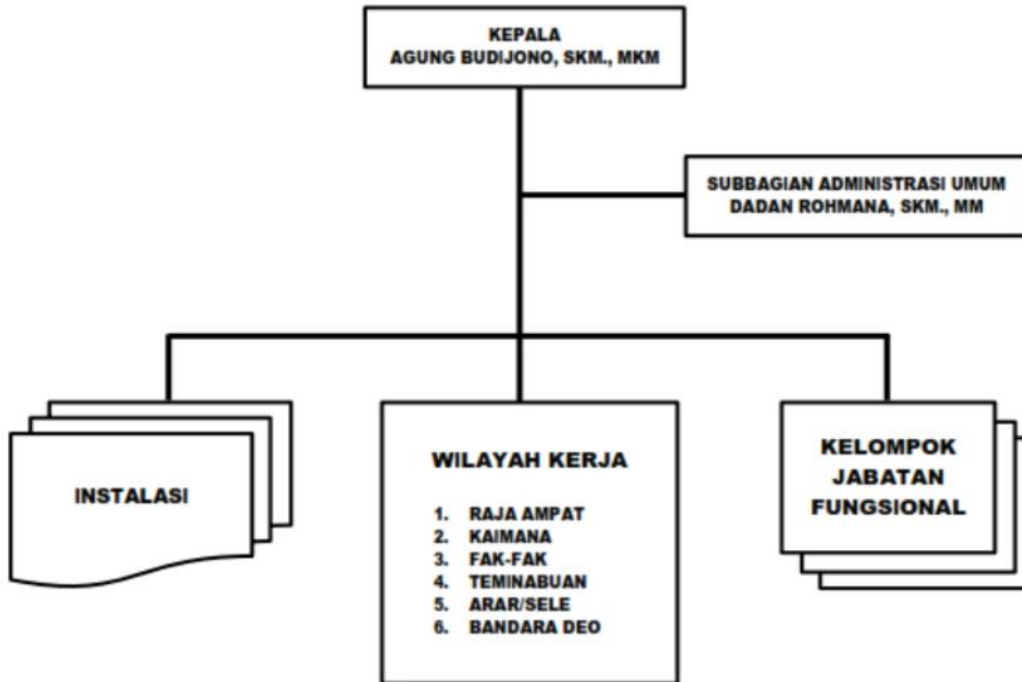
- a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

B. Struktur Organisasi



STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SORONG

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023



Gambar 1. Struktur Organisasi BKK Kelas II Soorng tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 adapun susunan organisasi BKK Kelas II Sorong terdiri dari:

1. Sub Bagian Administrasi Umum

Sub Bagian Administras Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

2. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, yang bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pembentukan tim kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi. Susunan Tim Kerja BKK Kelas II Sorong dan uraian tugasnya sebagaimana dimaksud di atas antara lain adalah sebagai berikut:

a. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Uraian tugas:

- 1) Pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menyebabkan KLB dan wabah;
- 2) Pelaksanaan surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit;
- 4) Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, serta diseminasi informasi kekarantinaan kesehatan;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan;
- 6) Penanggulangan KLB dan wabah yang berpotensi menyebar lintas wilayah dan negara;
- 7) Pelaksanaan identifikasi dan pemantauan potensi/dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan;
- 8) Pelaksanaan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan;
- 9) Penyiapan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran kekarantinaan kesehatan.

b. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang

Uraian tugas;

- 1) Pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut pada saat keberangkatan dan kedatangan;
- 2) Penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan dan dokumen lainnya terhadap alat angkut;
- 3) Pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada alat angkut;
- 4) Pengawasan faktor risiko kesehatan pada barang melalui pemeriksaan dokumen kekarantinaan kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada barang;
- 5) Penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap barang;
- 6) Pelaksanaan tindakan pengendalian pada barang diantaranya disinfeksi, dekontaminasi, dan pemusnahan barang yang berisiko.

c. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

Uraian tugas:

- 1) Pengawasan faktor risiko kesehatan pada lingkungan melalui pemeriksaan dokumen kesehatan, pemeriksaan fisik, dan/atau pemeriksaan laboratorium pada lingkungan;
- 2) Penerbitan dokumen kesehatan pada lingkungan;
- 3) Pelaksanaan tindakan penyehatan media lingkungan, termasuk pada situasi khusus;
- 4) Pelaksanaan tindakan pengamanan limbah, termasuk pada situasi khusus;
- 5) Pelaksanaan tindakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, termasuk pada situasi khusus.

d. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus

Uraian tugas:

- 1) Pengawasan penyakit menular dan faktor risiko kesehatan pada orang melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada orang;
- 2) Pelaksanaan vaksinasi internasional atau profilaksis;

- 3) Penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap orang;
- 4) Pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, bandar udara , dan pos lintas batas darat negara;
- 5) Penerbitan surat rekomendasi penolakan dan penundaan keberangkatan pelaku perjalanan;
- 6) Pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada orang, antara lain karantina, rujukan, isolasi, disinfeksi, dan dekontaminasi;
- 7) Pelaksanaan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medik;
- 8) Pengawasan, pencegahan, dan respon pada situasi khusus, anatar lain arus mudik dan balik, haji dan umroh, Pekerja Migran Indonesia (PMI), acara kenegaraan, acara internasional, serta *mass gathering*.

e. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas

Uraian tugas:

- 1) Penyediaan bahan media informasi publik;
- 2) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- 3) Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 5) Pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan; dan
- 6) Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan, wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong terdiri atas:

- a) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sorong (Kantor Induk)
- b) Wilayah Kerja Bandar Udara DEO Sorong
- c) Wilayah Kerja Pelabuhan Arar
- d) Wilayah Kerja Pelabuhan Teminabuan
- e) Wilayah Kerja Pelabuhan Raja Ampat
- f) Wilayah Kerja Pelabuhan Fak-Fak
- g) Wilayah Kerja Pelabuhan Kaimana.

1.3. SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

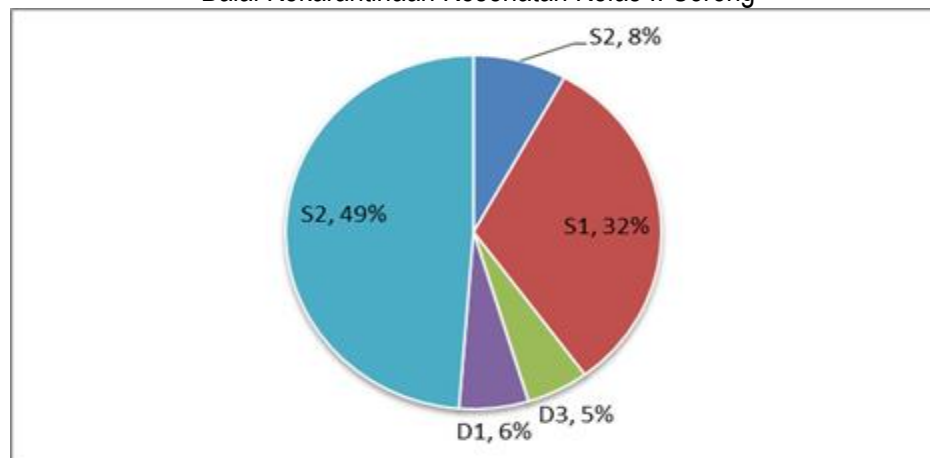
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong pada tahun 2024 berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang, dan jumlah tenaga PPNPN sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, dengan rincian distribusi per wilayah kerja sebagai berikut :

Grafik 1. Distribusi Pegawai Per Wilayah Kerja Tahun 2024

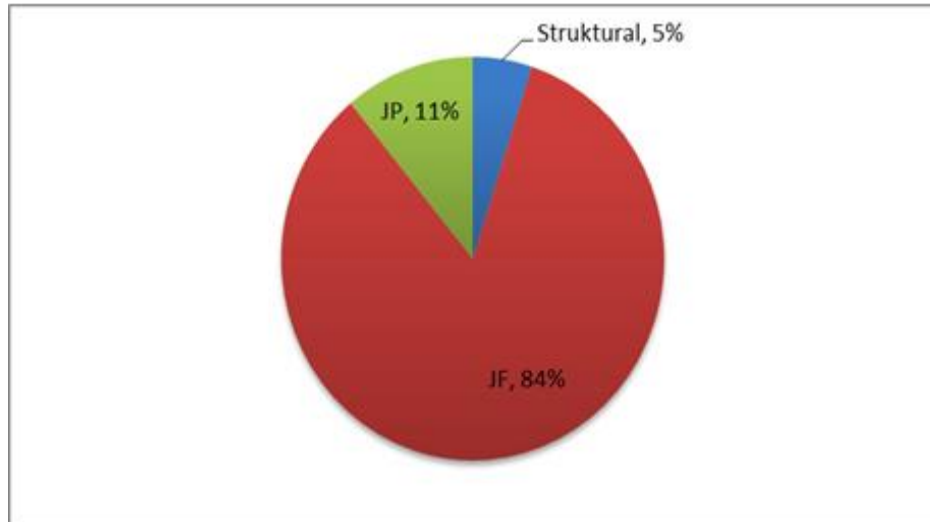


Dari grafik diatas, diketahui penempatan pegawai terbanyak di Kantor Induk berjumlah 17 orang yang dapat di mobilisasi ke pelabuhan sorong, pelabuhan rakyat dan tenaga bantuan di wilker Bandar Udara DEO Sorong. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan dan jenis jabatan distribusi pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. Distribusi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong



Grafik 3. Distribusi PNS Berdasarkan Jabatan
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong



B. Sarana dan Prasarana

Merupakan bagian dari salah satu sumber daya yang tidak kalah penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan institusi/lembaga. Sumber daya ini biasanya dalam pengadaannya merupakan barang belanja modal dan menjadi aset kekayaan yang dimiliki oleh satuan unit kerja. Jumlah dan jenis aset ini cukup banyak, tersebar di seluruh wilayah kerja. Untuk memberikan gambaran atas sumber daya sarana dan prasarana ini maka aset yang ada di kelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Gedung / bangunan

Gedung / bangunan merupakan salah satu wujud sumber daya sarana dan prasarana yang sangat berperan dan mendukung kegiatan pelayanan bagi unit satker. Adapun data distribusi aset prasarana di seluruh wilayah kerja adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Table 1. Distribusi Sarana Tanah, Gedung dan Bangunan
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong
Tahun 2024

No	Kantor Induk/ Wilayah Kerja	Gedung / Tanah	Luas Gedung /Tanah	Status tanah
1	Pelabuhan Laut Sorong	1. Gedung Kantor Induk 2. Gedung Isolasi	450 / 500 190 / 300	Milik Kemenkes Milik Kemenkes
2	Bandar Udara DEO (Kantor Induk)	1. Gedung Wilker DEO	270 / 2500	Milik Bandara
3	Wilker Raja Ampat	1. Gedung Wilker Raja Ampat	396 / 783	Milik Kemenkes
4	Wilker Fak-Fak	1. Gedung Kantor	- / -	Sewa
5	Wilker Kaimana	1. Gedung Wilker Kaimana	135 / 400	Milik Kemenkes
6	Wilker Arar	1 Gedung Kantor	220/1.000	Milik Kemenkes

Berdasarkan distribusi gedung terlihat bahwa dari enam wilayah kerja, baru lima diantaranya yang telah dilengkapi dengan prasarana ini, yaitu Pelabuhan Laut Sorong, Bandara DEO, Raja Ampat, Kaimana dan Arar. Sedangkan wilker lainnya belum memiliki fasilitas gedung maupun tanah milik sendiri. Untuk mendukung pelayanan pada public, maka diupayakan dengan cara mengontrak/menyewa bangunan di wilker yang bersangkutan, antara lain Fak-Fak, dan Arar. Pada tahun 2018 telah dibangun gedung baru Wilker Arar.

b. Kendaraan operasional

Untuk aset yang masuk dalam kelompok sarana transportasi terdapat dua jenis kendaraan yang dimiliki dan terdistribusi di seluruh wilayah kerja, yaitu jenis kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (sepeda motor). Untuk menggambarkan pendistribusiannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2. Jenis Kendaraan Roda Empat dan Distribusinya
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong
Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan	Σ	Tahun Perolehan	Kondisi	Distribusi
1	Toyota Fortuner	1 unit	2016	Baik	induk
2	Toyota Avanza	1 Unit	2015	Baik	Induk
3	Suzuki Ertiga	1 Unit	2015	Baik	Induk
4	Suzuki APV (Ambulans)	1 Unit	2012	Baik	Raja Ampat
5	Suzuki APV (Ambulans)	1 Unit	2021	Baik	Induk
6	Ambulans Isuzu	1 Unit	2014	Baik	Induk
Jumlah		11 Unit			

Sampai akhir tahun 2024 kendaraan roda empat yang dimiliki tercatat 6 kendaraan. Tidak ada pembelian kendaraan baru selama tahun 2018 baik roda dua maupun roda empat.

Untuk distribusi jenis kendaraan roda dua, datanya adalah seperti di sajikan pada tabel berikut

Table 3. Jenis Kendaraan Roda Dua dan Distribusinya
Balai Kekarantina Kesehatan Kelas II Sorong
Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan	Σ	Tahun Perolehan	Kondisi	Distribusi
1	Yamaha YT 115	1 Unit	1998	Rusak Berat	Induk
2	Honda CG	1 Unit	1978	Rusak Berat	Induk
3	Honda Vario	4 Unit	2011	Baik	Induk(2), DEO(1), Fak2(1)
4	Suzuki Hayate	5 Unit	2012	Baik	Induk(4), Temi(1)
5	Suzuki Thunder	4 Unit	2008	Rusak Ringan	Induk(2), R4(1), Arar (1)
6	Suzuki Smash	1 Unit	2005	Rusak Berat	Induk(1),
7	Suzuki Shogun	3 Unit	2005	Baik	Fak2(1), DEO(1) , Induk(1)
8	Suzuki Shogun SP	2 Unit	2006	Rusak Ringan, Rusak Berat	Induk(1),Kaimana(1)
Jumlah		21 Unit			

Tercatat ada 21 kendaraan jenis sepeda motor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lapangan. Namun berdasarkan kondisinya terdapat 4 (tiga) kendaraan yang mengalami kondisi rusak berat, dan 1 rusak ringan.

c. Peralatan teknis

Disamping sarana bangunan dan alat angkut, juga terdapat sarana peralatan teknis yang menunjang kelancaran pelaksanaan program kegiatan. Jenis sarana ini diantaranya adalah berbagai peralatan pengawasan dan pengendalian penyakit dan vektornya, peralatan dalam pengawasan kualitas lingkungan serta peralatan pelayanan kesehatan terbatas di klinik kesehatan. Adapun secara lebih lengkap dilaporkan tersendiri pada laporan Sistem Akutansi Barang Milik Negara (SABMN).

Table 4. Peralatan Teknis dan Distribusinya
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong
Tahun 2024

No	Nama barang	Jumlah	Satuan	Distribusi
1	Evaluation Suhu	2	Buah	Induk
2	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	2	Buah	Induk
3	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	5	Buah	Induk, Arar, Raja Ampat
4	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	9	Buah	Induk, Arar, Raja Ampat, Kaimana, Fak Fak
5	Selo (Kotak Penyimpanan) Dengan Pengatur Temperatur	24	Buah	Induk
6	Mesin Fogging	11	Buah	Induk, Wilker Arar, Raja Ampat, Kaimana, Fak Fak
7	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	8	Buah	Induk, Deo, Klinik Pelabuhan
8	Tensimeter	10	Buah	Induk, Arar, Raja Ampat, Kaimana, Fak Fak, Deo
9	Basic Diagnostic Kit (Alat Kedokteran Umum)	1	Buah	Induk
10	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	3	Buah	Induk
11	Resusitasi Dewasa	1	Buah	Induk
12	Rectal ApuratySet	1	Buah	Induk
13	Oxygen Therapy Set	1	Buah	Induk
14	Cardio Aid	3	Buah	Induk
15	X-RayViewer	1	Buah	Induk
16	Stool Fixed Hight	1	Buah	Induk
17	Defibrilator	1	Buah	Induk
18	Alcohol Cotton Case	7	Buah	Induk
19	Cardiac Resuscitator	1	Buah	Induk
20	Cassete Film (Alat Kedokteran Radiodiagnostic)	1	Buah	Induk
21	Binocular Microscope (Alat Kedokteran Patologi Anatomy)	1	Buah	Induk
22	Film Hanger	1	Buah	Induk
23	Film Pass Box	1	Buah	Induk
24	Lead Apron	1	Buah	Induk
25	SurveyMeter (Alat Kedokteran Radioterapy)	1	Buah	Induk
26	Blood Presure Meter/Tensimeter	1	Buah	Induk
27	Manual Resuscitation Set Adult & Child	1	Buah	Induk
28	Alat Kesehatan Umum Lainnya	7	dummy	Induk
29	Water Test	1	Buah	Induk
30	Microscope Binocular	1	Buah	Induk
31	Fotometer	4	Buah	Induk
32	Mikroskop Binokuler	2	Buah	Induk
33	Alat Laboratorium Makanan Lainnya	2	dummy	Induk
34	Pyrometer Radiasi	2	Buah	Induk
35	Instron Food Tester	1	Buah	Induk
36	Sprayer	7	Buah	Induk, Arar, Raja Ampat, Kaimana, Fak Fak
37	Water Analysis Test Kitt	1	Buah	Induk
38	Gas Detector	1	Buah	Induk
39	ChromatographyDeveloping Chamber	1	Buah	Induk
40	Generator Set (Lab Scale)	1	Buah	Induk
41	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	2	Buah	Induk
42	Darkroom Equipment	1	Buah	Induk
43	Sound Level Calibrator	2	Buah	Induk
44	Lux Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	1	Buah	Induk
45	Data Loger	9	Buah	Induk
46	Water Testing Kit	1	Buah	Induk
47	Portable X-Raydan Film	1	Buah	Induk
48	Detektor Gas Kimia	2	Buah	Induk
49	Swing Fog SN 50	1	Buah	Induk
50	Set Detektor Biologi	3	Buah	Induk
51	Kamera Digital	1	Buah	Induk
52	Barcode Reader	2	unit	Induk
53	Thermometer Digital Portable	2	Buah	Induk
54	Thermal Analysis System	4	Buah	Induk
55	Blower	7	Buah	Induk, Arar, Raja Ampat, Kaimana, Fak Fak

C. Dana

Anggaran pada DIPA awal Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong tahun 2024 yang berasal dari APBN sebesar Rp 12.243.373.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 11.599.207,- dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 644.166.000,-.

Selama tahun anggaran 2024 terdapat beberapa kali Revisi DIPA, yang dirangkum dalam tabel berikut:

Table 5. Perjalanan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2024

NO	REVISI DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN DIPA	ALASAN PERUBAHAN
1.	15 Februari 2024	12.324.373.000	Revisi POK 1	- Pemutahiran data POK - RPK / RPD - Pergeseran Belanja Pegawai - Pergeseran Akun Belanja Barang dan tidak merubah nilai
2.	26 April 2024	12.324.373.000	Revisi DIPA 1	Revisi Halaman 3 DIPA
3.	8 Juli 2024	12.243.373.000	Revisi DIPA 2	- Pengurangan Belanja Pegawai Pagu Berkurang - Halaman 3 DIPA
4.	12 Juli 2024	12.243.373.000	Revisi POK 2	Pergeseran Belanja Barang Pagu Tetap
5.	14 Oktober 2024	12.243.373.000	Revisi POK 3	Pergeseran Belanja Barang Pagu Tetap
6.	18 November 2024	12.243.373.000	Revisi DIPA 2	- Pergeseran Belanja Pegawai pagu tetap - Revisi Blokir AA
7.	12 Desember 2025	12.243.373.000	Revisi POK 4	Pergeseran Belanja Barang Pagu tetap
8.	11 Desember 2025	12.243.373.000	Revisi POK 5	Pergeseran Pagu Belanja Pegawai Pagu tetap

Realisasi anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 11.926.760.667,- atau sebesar 97,41 % dari pagu anggaran sebesar Rp 12.243.373.000,-.

Realisasi anggaran yang berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp 11.303.450.825,- (97,50%) dari total anggaran Rp 11.599.207.000,- sedangkan realisasi anggaran bersumber PNBP sebesar Rp 617.309.842,- (95,83%) dari total anggaran Rp 644.166.000,-. Keseluruhan sisa anggaran BKK Sorong tahun 2024 sebesar Rp 316.612.333,- atau 2,85 % dari keseluruhan anggaran.

Dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi anggaran mengalami penurunan sebesar 2,71%. Dimana pada tahun 2024 tidak terdapat belanja modal. Adapun kenaikan sebesar 20,82% berasal dari Belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan pegawai.

Table 6. Perbandingan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun %
	30 Desember 2024	2023	
Belanja Pegawai	6,017,667,843	4,980,664,169	20.82
Belanja Barang	5,909,092,824	5,946,745,032	(0.63)
Belanja Modal	0	1,331,661,677	(100)
Total Belanja	11,926,760,667	12,259,070,878	(2.71)

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

2.1. DASAR HUKUM

1. UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. UU No 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. PP No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
8. PP No 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
9. PP No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024;
13. Kepmenkes No. 1407 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara;
14. Kepmenkes No. 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
15. Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/2149/2023 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
16. Permenkes 949 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

17. Permenkes No 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
18. Permenkes No 1501 Tahun 2010 Tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah & Upaya penganggulangannya;
19. Permenkes No.2052 / Menkes / Per/ X / 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran
20. Permenkes No. 34 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat;
21. Permenkes No. 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara, Sehat;
22. Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
23. Permenkes No 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
24. Permenkes No. 40 Tahun 2015 tentang Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal
25. Permenkes No. 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional
26. Permenkes No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
27. Permenkes No 10 Tahun 2023 Organisasi Tentang Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
28. Permenkes No. 2 tahun 2023 Tentang Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014
29. Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 Tentang SOTK Kemenkes
30. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
31. *International Health Regulation* (IHR) Tahun 2005
32. Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Sorong Tahun 2020-2024
33. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara

2.2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

2.2.1 Tujuan

Mewujudkan Pelabuhan Sehat melalui upaya peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan masyarakat. Terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan masyarakat secara berhasil-guna dan

berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui:

1. Pelaksanaan Surveilans Karantina Kesehatan
2. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik
3. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
4. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
6. Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.
7. Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
8. Pelaksanaan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.

2.3.1 Sasaran dan Indikator

Selaras dengan sasaran program P2P dalam Rencana Aksi Program P2P tahun 2020-2024, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong adalah “Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah” sasaran strategis ini ditandai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yakni :

1. Indeks deteksi faktor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBDN sebesar 0.93 pada akhir tahun 2024;
2. Persentasi faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 99% pada akhir tahun 2024;
3. Indeks pengendalian faktor resiko di pintu masuk Negara sebesar 0.97 pada akhir tahun 2024:
4. Nilai kinerja anggaran yaitu 90 Pada akhir tahun 2024:
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu 96% pada akhir tahun 2024:
6. Kinerja Implementasi WBK Satker yaitu 78 pada akhir tahun 2024;
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya yaitu 95% pada akhir tahun 2024;
8. Persentase realisasi anggaran yaitu 96% pada akhir tahun 2024.

Table 7. Indikator Kinerja BKK Sorong

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target
				2024
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan (Sebelum Revisi)	0,93
			Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan / PLBDN (Setelah Revisi)	
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0,97
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	90
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
		6	Kinerja implementasi WBK satker	78
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Setelah Revisi)	95%
		8	Persentase Realisasi Anggaran	96%

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN

3.1. STRATEGI PELAKSANAAN TUJUAN

Strategi yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Table 8. Strategi Pelaksanaan Tujuan

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1.	Indeks deteksi factor risiko penyakit di bandara/pelabuhan/PLBDN	1. Kegiatan Penapisan/Pengawasan Orang yang Datang/Keluar Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong. Sasaran kegiatan ini adalah pelaku perjalanan yang terdiri dari penumpang baik melalui transportasi laut maupun udara yang tiba/berangkat di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong, ABK/Crew pesawat, screening HIV/AIDS, screening TB, migrasi malaria, kunjungan poliklinik, screening Penyakit Tidak Menular (PTM), surat keterangan pengujian kesehatan dan penerbitan ICV. 2. Kegiatan Pemeriksaan Faktor Risiko Pada Alat Angkut. 3. Kegiatan Pemeriksaan Faktor Risiko Pada Barang. Pemeriksaan factor risiko barang dilakukan pada lalu lintas pengiriman jenazah, kerangka dan abu jenazah yang berangkat/datang melalui Pelabuhan dan Bandara di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong. 4. Kegiatan Pemeriksaan Faktor Risiko Pada Lingkungan.
2.	Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan	1. Kegiatan pengendalian faktor risiko pada orang di seluruh pintu masuk wilayah BKK Sorong. 2. Kegiatan pengendalian faktor risiko pada alat angkut 3. Kegiatan pengendalian faktor risiko pada barang 4. Kegiatan pengendalian faktor risiko pada lingkungan diantaranya adalah pengendalian faktor risiko pada tempat-tempat umum (TTU), pengendalian faktor risiko pada tempat pengolahan makanan, pengendalian air bersih di lingkungan buffer dan perimeter, pengendalian jentik nyamuk di lingkungan buffer dan perimeter, pengendalian nyamuk aedes aegypti di lingkungan buffer dan perimeter, pengendalian nyamuk malaria di lingkungan buffer dan perimeter,

		pengendalian vektor diare (lalat) di lingkungan buffer dan perimeter dan pengendalian vektor pes di lingkungan buffer dan perimeter.
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara	1. Respon sinyal kewaspadaan dini KLB di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong dilakukan dengan melakukan surveilans aktif di wilayah kerja terhadap penyakit yang berpotensi terjadinya wabah. Kegiatan surveilans yang dilakukan adalah konfirmasi kasus suspek COVID-19, Malaria, DBD dan Polio yang dilakukan pada ABK, penumpang, dan komunitas Pelabuhan/Bandara 2. Kegiatan surveilans vektor pes, malaria, kepadatan kecoa, kepadatan lalat, kegiatan layanan survei vektor DBD dan layanan pengendalian vektor DBD, kegiatan pemeriksaan sanitasi bangunan TTU, kegiatan pemeriksaan tempat pengolahan pangan dan kegiatan Pemeriksaan PAB di wilayah kerja BKK Sorong.
4.	Nilai Kinerja Anggaran	1. Melakukan Rekonsiliasi data, melakukan monitoring, evaluasi dan melakukan pengisian emonev DJA. Pemantauan atas rencana pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran setiap bulan, sehingga meminimalisir adanya gap antara rencana penarikan dana/rencana pelaksanaan kegiatan dengan realisasinya. 2. Koordinasi Tim kerja yang ada di BKK Sorong dengan penanggungjawab keuangan dalam proses pencairan anggaran berjalan dengan baik sehingga meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Melakukan perencanaan dengan matang, dan yang telah direncanakan tersebut agar dilaksanakan tepat waktu sehingga tidak terjadi Deviasi Halaman III DIPA secara terus menerus di triwulan berjalan. 2. Melakukan revisi DIPA untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, dan memastikan tidak ada pagu minus di akhir tahun anggaran untuk belanja gaji pegawai. 3. Melakukan akselerasi kemajuan tagihan dengan mempercepat serapan belanja, sehingga sampai dengan akhir tahun 2024 capaian realisasi anggaran mencapai 98.04%. 4. Mendaftarkan/menyampaikan ADK Data kontrak Ke KPPN paling lambat lima hari kerja setelah kontrak ditandatangani oleh PPK dan pihak Penyedia dengan tujuan kepatuhan terhadap regulasi dan untuk menjamin kepastian penyediaan dana.

		5. Meminimalisir kesalahan SPM dengan memastikan kebenaran data supplier, kebenaran rekening pihak penerima, kelengkapan dokumen dan ADK SPM serta kebenaran pada uraian SPM. 6. Melakukan revolving uang persediaan sebelum batas akhir satu bulan setelah SP2D UP terbit. 7. Melakukan pengajuan SPM akhir tahun dengan mengikuti ketentuan pada langkah langkah akhir tahun dan tidak melebihi batas waktu, sehingga pada akhir tahun tidak terdapat dispensasi pengajuan SPM yang disebabkan oleh keterlambatan pengajuan SPM. 8. Melakukan perbaikan kinerja melalui pemantauan dan pengawasan secara online untuk memastikan keselarasan penyerapan anggran dan kinerja capaian outputnya.
6.	Kinerja Implementasi WBK Satker	1. Adanya inovasi baru seperti Survey Role Mode Pimpinan, Motto Pelayanan (NOKEN). 2. Telah dibentuk SK Tim Agent of Change (AoC). 3. Telah dibuat dan disusun SOP dari masing-masing seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BKK Kelas II Sorong, baik yang bersifat administrative maupun teknis. 4. LHP telah selesai dicicil setiap bulannya melalui pemotongan tunjangan kinerja oleh pihak wajib bayar. 5. Program Kerja terlaksana sesuai dengan draf rancangan kegiatan.
7.	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	1. Mendorong ASN untuk mengikuti pelatihan baik melalui elarning, pelatihan secara klasikal maupun mengikuti seminar secara daring. 2. Menyebarkan informasi pelatihan atau seminar ke Group WA. 3. Menyiapkan anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi ASN meskipun anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN terbatas.
8.	Persentasi Realisasi Anggaran	1. Menyusun perencanaan anggaran dengan baik 2. Menyusun RPK dan RPD dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RPK dan RPD 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran 4. Melakukan evaluasi kegiatan dan menuangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi.

3.2. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN

- a. Belum semua tersedia fasilitas pengawasan lalu lintas pelaku perjalanan berupa thermal scanner, ambulans karantina dan kendaraan vektor di seluruh wilayah kerja BKK Kelas II Sorong.
- b. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedis yang memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kerja BKK Kelas II Sorong.
- c. Sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan kesehatan lingkungan meliputi fasilitas penunjang laboratorium lingkungan dan entomologi belum memadai.
- d. Belum semua wilayah kerja BKK Kelas II Sorong terbentuknya forum Pelabuhan sehat.
- e. Kendaraan operasional ambulance tidak dimiliki oleh semua wilayah kerja BKK Kelas II Sorong, sehingga pelayanan pasien meliputi antar jemput pasien dalam rujukan dan evakuasi korban kegawat daruratan kecelakaan laut tidak maksimal.
- f. Kendaraan operasional vektor yang terbatas sehingga proses distribusi petugas dan peralatan dalam rangka pengendalian vector tidak dapat berjalan dengan maksimal.
- g. Frekuensi pengangkutan sampah ketempat pembuangan akhir sampah sering mengalami keterlambatan sehingga volume sampah di tempat pembuangan sampah sementara di wilayah Pelabuhan/bandara meningkat.
- h. Belum meratanya distribusi SDM kesehatan diantaranya jabatan Dokter, Perawat, Epidemiologi Kesehatan, Entomologi Kesehatan dan Sanitarian di masing-masing wilayah kerja BKK Kelas II Sorong yang dapat menghambat proses deteksi dini dan respon terhadap factor risiko penyakit.
- i. Masih dijumpai penolakan tindakan pengendalian vector di lingkungan buffer Pelabuhan dan bandara oleh Masyarakat sekitar.
- j. Terdapat sumber factor risiko perindukan lalat seperti pasar ikan, pasar buah dengan sanitasi pengelolaan sampah yang kurang di beberapa wilayah kerja Pelabuhan/Bandara.
- k. Pada TPM di wilayah kerja Pelabuhan Rakyat, Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Raja Ampat memiliki bangunan yang bersifat semi permanen sehingga berpotensi terhadap cemaran fisik, keberadaan vector dan agen biologis lainnya.
- l. Kendaraan operasional ambulance evakuasi tidak dimiliki oleh semua wilayah kerja BKK Kelas II Sorong.

- m. Belum tersedianya laboratorium kesehatan lingkungan yang terakreditasi di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong sehingga pemeriksaan sampel lingkungan tidak bisa terlaksana dengan maksimal.
- n. Pelaksanaan kegiatan telah berjalan namun anggaran belum teralisasi sehingga pada capaian output muncul GAP antara realisasi output.
- o. Perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi yang diakibatkan beberapa factor eksternal dan internal sehingga tidak sesuai.
- p. RPK dan RPD yang disusun terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan targetnya.
- q. Penyusunan dokumen perencanaan implementasi WBK pada masing-masing POKJA belum optimal
- r. Pendokumentasian kegiatan belum berjalan dengan baik
- s. Mendorong ASN untuk mengikuti pelatihan baik melalui elarning, pelatihan secara klasikal maupun mengikuti seminar secara daring.
- t. Menyebarkan informasi pelatihan atau seminar ke Group WA.
- u. Menyiapkan anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi ASN meskipun anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN terbatas.
- v. Realisasi anggaran belanja belum sesuai dengan dokumen RPK dan RPD.
- w. Rendahnya partisipasi tim kerja dalam pengoptimalan anggaran belanja.
- x. Rendahnya peran koordinator wilayah kerja dalam mengoptimalkan anggaran kegiatan teknis.

3.3. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN

- a. Mengusulkan penambahan *thermal scanner*, ambulance standar karantina dan kendaraan operasional vektor untuk menunjang kegiatan deteksi faktor risiko dipintu masuk negara.
- b. Mengoptimalkan pelayanan petugas medis/paramedis yang ada sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- c. Menganalisa kembali terhadap beban kerja sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam pengusulan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) baik medis maupun paramedis di tahun berikutnya untuk penempatan di masing-masing wilker sesuai kebutuhan sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan lebih optimal.

- d. Mengusulkan penghapusan peralatan laboratorium lingkungan dan entomologi yang telah rusak berat untuk selanjutnya dilakukan pengusulan pengadaan pada anggaran tahun berikutnya.
- e. Mengusulkan anggaran pertemuan pembentukan pelabuhan sehat di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong.
- f. Mengusulkan penambahan SDM kesehatan baik melalui formasi CPNS umum maupun menambah tenaga PPPK.
- g. Mengoptimalkan SDM Kesehatan yang ada dalam melakukan upaya pengendalian factor risiko di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong.
- h. Mengusulkan penambahan ambulance standar karantina dan kendaraan operasional vektor pada perencanaan anggaran tahun selanjutnya.
- i. Melakukan pengendalian/penyemprotan lalat secara rutin setiap bulan di lokasi pembuangan sampah sementara mengacu pada hasil survey vector dan binatang pembawa penyakit.
- j. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor di Pelabuhan dan Bandara dalam mengatur pengelolaan sampah untuk menekan berkembang Posoan lalat.
- k. Melakukan koordinasi dengan tokoh Masyarakat dan pemberian KIE tentang pentingnya pengendalian vector penyakit sebelum tindakan.
- l. Advokasi kepada pihak pasar terkait dengan pengelolaan sampah sesuai standar dengan tidak menimbun sampah basah >24 jam serta melakukan pengendalian vector lalat secara rutin.
- m. Diseminasi informasi hasil pemeriksaan TPM kepada pengelola Pelabuhan terkait dengan factor risiko konstruksi bangunan TPM sehingga menjadi pertimbangan perencanaan pengelola dalam memperbaiki konstruksi bangunan TPM pada tahun-tahun berikutnya.
- n. Menganalisa kembali terhadap beban kerja sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam pengusulan SDM di tahun berikutnya.
- o. Pengusulan fasilitas ambulans karantina untuk mendukung system kewaspadaan dini di wilayah kerja.
- p. Pengusulan anggaran pemeriksaan sampel lingkungan (air bersih dan makanan) di laboratorium terpadu terdekat dengan lokasi BKK Kelas II Sorong.
- q. Mengupayakan proses kegiatan dan penagihan / pencairan anggaran dilaksanakan pada bulan yang sama sehingga tidak terjadi GAP antara realisasi output.
- r. Mengupayakan Optimalisasi Penyerapan Anggaran berupa belanja barang dan belanja modal sesuai dengan RPK dan RPD Satker.

- s. Penyusunan dokumen perencanaan implementasi WBK pada masing-masing POKJA dilaksanakan dengan analisis SMART.
- t. Monitoring dan evaluasi terhadap pendokumentasian kegiatan.
- u. Menyebarkan motivasi kepada pegawai berupa reward (HOTM) jika mampu menyelesaikan JPL 20 ASN.
- v. Penguatan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran mengacu pada dokumen RPK dan RPD dengan melibatkan ketua tim kerja dan koordinator wilayah kerja.

BAB IV

HASIL KEGIATAN

4.1 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong, melalui berbagai Tim Kerja, berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko penyebaran penyakit dan faktor risiko kesehatan. Setiap Tim Kerja memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan BKK Sorong, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, optimalisasi pengawasan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara, serta penguatan zona integritas untuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sasaran yang ingin dicapai meliputi peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan karantina kesehatan, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih efektif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan inovasi dalam sistem pengawasan dan pelayanan. Dengan sinergi antar Tim Kerja, BKK Sorong berupaya mewujudkan pelayanan kesehatan karantina yang prima, transparan, dan berdaya saing guna mendukung kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Tim Kerja terdiri dari:

1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas
6. Sub Bagian Administrasi Umum

4.2 SURVEILANS DAN PENINDAKAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dari tim kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Surveilans Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan yang Berpotensi Menyebabkan KLB dan Wabah melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon.

Sistem Kewaspadaan dini dan Respon merupakan sebuah system yang berfungsi dalam mendeteksi adanya ancaman indikasi KLB yang dilaporkan secara mingguan melalui aplikasis SKDR yang dapat menampilkan alert atau sinyal peringatan dini adanya peningkatan kasus

melebihi ambang batas disuatu wilayah, alert atau sinyal peringatan dini yang muncul pada sistem bukan berarti sudah terjadi KLB namun merupakan pra KLB yang mengharuskan petugas melakukan respon cepat. Melalui SKDR kita akan mendapatkan informasi tentang situasi penyakit menular yang berpotensi menimbulkan terjadinya KLB, Trend penyakit, Sinyal ancaman KLB untuk merespon secara cepat pencegahan meluasnya KLB, Informasi Awal untuk melakukan investigasi dan upaya pencegahan serta sebagai bahan penyampaian informasi kepada lintas program dan sektor terkait sebagai bahan pengambil keputusan.

Metode Surveilans bidang kesehatan terbagi menjadi dua yaitu surveilans dengan berbasis Indikator dan surveilans berbasis kejadian. Surveilans berbasis indicator bertujuan memberikan gambaran tentang faktor risiko suatu penyakit dan berbagai masalah yang mempengaruhi sektor kesehatan termasuk masalah kesehatan yang berfungsi sebagai indicator suatu program dengan sumber data terstruktur sebagai acuannya. Data tersebut dipergunakan sebagai langkah awal kewaspadaan dini terhadap suatu penyakit atau masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Surveilans berbasis kejadian dilakukan untuk mendeteksi masalah kesehatan yang tidak terdeteksi oleh surveilans berbasis indicator. Misalnya beberapa kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah, dan Malaria yang diketahui dari media massa ataupun dari pelaksanaan active case finding yang dilakukan pada pelaku perjalanan yang bergejala klinis di pintu masuk wilayah. Surveilans berbasis kejadian dilakukan secara berkesinambungan sama seperti pelaksanaan surveilans berbasis indicator.

Sinyal Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon yang diperoleh dari Aplikasi SKDR Kementerian Kesehatan pada pemantauan harian pada pelaksanaan surveilans berbasis indicator (*Indicator Based Surveilans/IBS*) dan pelaksanaan surveilans berbasis kejadian (*Event Based Surveilans/EBS*). Berikut ini merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BKK Kelas II Sorong sebagai bentuk tindakan kewaspadaan dini terhadap KLB dan Bencana:

1.1. Surveilans penyakit berbasis Sistem Kewaspadaan Dini KLB pada Fasyankes di wilayah kerja BKK kelas II Sorong (IBS dan EBS)

- Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan deteksi dini KLB penyakit menular respon cepat terhadap sinyal KLB yang muncul di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong

- Masukan

Surveilans berbasis Indikator melalui website Sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) maupun berdasarkan rumor di masyarakat yang berada di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong

- Luaran (*Output/Input*)

Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengamatan pelaporan surveilans terpadu penyakit berbasis website baik itu laporan berbasis kejadian berdasarkan minggu epidemiologi di tahun 2024 sebanyak 52 minggu dan pelaporan kegiatan dituangkan dalam bentuk laporan bulanan. Namun hasil pengamatan berupa identifikasi alert/sinyal ditindak lanjuti secara mingguan berdasarkan minggu epidemiologi. Pemantauan laporan IBS dan EBS berasal dari fasyankes di wilayah kerja BKK kelas II Sorong dengan rincian sebagai berikut:

Table 9. Daftar Fasyankes yang berada di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024

Fasyankes BKK Sorong	Fasyankes Non BKK Sorong
- Polik Pelabuhan Laut Sorong - Polik Bandara DEO Sorong	- Puskesmas Malawei - Puskesmas Remu - Puskesmas Mariat - Puskesmas Malawili

Table 10. Surveiles 10 besar penyakit di Wilker BKK Sorong Tahun 2025

No	Diagnosa Penyakit	Fasyankes Non BKK Kelas II Sorong												Jumlah	%
		Bulan													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Polio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pertusis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	HIV/AIDS	4	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	3	16	0,2
5	Pneumonia	4	1	0	0	0	1	1	0	1	14	4	1	27	0,3
6	Suspek Campak	5	5	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	13	0,18
7	TBC	3	5	0	0	2	3	3	1	14	39	38	15	123	2,0
8	Malaria	32	30	0	26	13	13	19	10	15	24	18	16	216	3,0
9	Diare	49	28	0	45	23	38	50	64	73	55	54	34	513	7,0
10	ISPA	817	331	0	238	452	483	674	511	661	767	662	607	6203	87.23
	Total	914	400	0	309	491	539	747	587	765	906	777	676	7111	100

No	Diagnosa Penyakit	Fasyankes BKK Kelas II Sorong												Jumlah	%
		Bulan													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Polio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pertusis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	HIV/AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pneumonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,33
6	Suspek Campak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Malaria	3	5	3	0	0	0	2	3	0	0	1	0	17	6
9	Diare	1	3	5	6	1	1	3	1	0	4	0	4	29	10
10	ISPA	2	23	28	13	32	32	36	37	21	21	2	9	256	84
	Total	6	31	36	19	33	33	41	41	21	25	3	14	303	100

1.2. Verifikasi Rumor

- Tujuan

Kegiatan verifikasi rumor merupakan tindak lanjut dan respon terhadap alert yang muncul pada aplikasi SKDR dan juga sebagai tindak lanjut dari informasi yang diperoleh dari masyarakat dan media yang berbasis kejadian.

- Masukan

Kegiatan ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder (data penderita, tatalaksana, hasil laboratorium) pada fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat sinyal/alert. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Fasilitas kesehatan yang merupakan wilayah kerja dari BKK kelas II sorong untuk melakukan verifikasi kasus (benar adanya dan berada di wilayah kerja BKK kelas II Sorong). Pelaksana kegiatan ini adalah petugas epidemiolog kesehatan, dokter, perawat dan analis di BKK kelas II Sorong. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari DIPA BKK kelas II Sorong Tahun anggaran 2024.

- Luaran (*Output*)

Jumlah sinyal/alert KLB yang muncul di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong selama tahun 2024 sebanyak 8 sinyal dengan hasil verifikasi positif 8 yang berada di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong. Semua sinyal/alert di respon kurang dari 24 jam. Berikut ini merupakan gambaran distribusi jumlah sinyal/alert selama tahun 2024.

Table 11. Jumlah Sinyal SKD KLB yang muncul di wilayah kerja
BKK Kelas II Sorong Tahun 2024

Bulan	Jumlah Sinyal	Di respon < 24 Jam
Januari	0	0
Februari	0	0
Maret	0	0
April	0	0
Mei	1	ya
Juni	0	ya
Juli	2	ya
Agustus	1	ya
September	4	ya
Oktober	0	0
November	0	0
Desember	0	0

1.3. Penyelidikan Epidemiologi

- Tujuan

- Mengetahui gambaran kasus penyakit berdasarkan orang ,tempat dan waktu dimana kasus tersebut terkonfirmasi
- Mengidentifikasi sumber penularan kasus dan analisis faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyebaran kasus dari tempat rumah kasus tersebut terkonfirmasi
- Hasil Penyelidikan Epidemiologi dapat digunakan sebagai dasar dala menentukan tindakan penanggulangan yang tepat untuk mencegah terjadinya penularan penyakit

- Masukan

Penyelidikan Epidemiologi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi rumor terhadap sinyal/alert yang muncul terhadap kasus penyakit yang melaporkan dan berada di wilayah kerja BKK Kelas II sorong atau berdasarkan permintaan dari Dinas Kesehatan/Puskesmas setempat. Metode penyelidikan epidemiologi yang dilakukan untuk mencapai tujuanpenyelidikan epidemiologi in sebagai berikut:

- Melakukan wawancara dengan penderita dan follow up kondisi kesehatan penderita
- Melakukan Wawancara adanya kontak erat kasus bergejala /Riwayat bergejala tidak bergejala dan peeriksaan kondisi kesehatan bagi kontak erat kasus bergejala maupun yang Riwayat bergejala

- Pengambilan Specimen bagi yang bergejala ataupun yang memiliki Riwayat bergejala
- Penyelidikan Faktor risiko lingkungan yang disesuaikan dengan jenis kasus penyakit yang ditemukan
- Rujukan specimen ke Fasilitas Laboratorium jika diperlukan

Pelaksana kegiatan penyelidikan epidemiologi adalah petugas epideiolog kesehatan, dokter, entomologi kesehatan, analis kesehatan, perawat yang berkolaborasi sesuai dengan keahlian fungsionalnya. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari DIPA BKK kelas II Sorong Tahun Anggaran 2024.

- Luaran (*Output*)

Selama Tahun 2024 penyelidikan Epidemiologi yang telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu Penyelidikan Epidemiologi Malaria konfirmasi yang dilaksanakan dengan petugas puskesmas Remu sehubungan Lokasi kasus berada di buffer wilayah kerja BKK kelas II Sorong.

Table 12. Hasil penyelidikan Epidemiologi BKK Kelas II Sorong
Bersama dengan petugas Puskesmas Remu Tahun 2024

No	Wilker	Bulan	Lokasi PE	Jenis Penyakit	Kasus Tambahan	Hasil Penyelidikan
1	Pelabuhan Laut Sorong	Mei	RT IV RW I Kel. Klasabi Kampung Kokoda	Malaria Konfirmasi	2	Klasifikasi Kasus adalah kasus indigenous dimana sumber penularan berasal dari wilayah setempat tanpa adanya riwayat berpergian ke daerah endemis (biasanya dalam 4 minggu terakhir) dan focus aktif dalam konteks malaria merujuk pada daerah reseptif yang masih terdapat penularan setempat dalam tahun berjalan serta terdapat dua kasus tambahan
2	Pelabuhan Laut Sorong	Juli	Jl. Mandiri RT 5 RW 6 Kel. Remu Sealatan	Malaria Konfirmasi	0	Klasifikasi Kasus adalah kasus indigenous dimana sumber penularan berasal dari wilayah setempat tanpa adanya riwayat berpergian ke daerah endemis (biasanya dalam 4 minggu terakhir) dan focus aktif dalam konteks malaria merujuk pada daerah reseptif yang masih terdapat penularan setempat dalam tahun berjalan serta terdapat kasus tambahan

4.3 PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG

A. Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal

Pengawasan lalu lintas kapal merupakan salah satu fungsi kekarantinaan, pengawasan dilakukan terhadap kapal yang datang dan berangkat dari pelabuhan dalam negeri dan pelabuhan luar negeri serta ABK Kapal dan barang bawaannya. Kegiatan pengawasan lalu lintas kapal ditujukan pada kapal yang datang dari luar negeri baik negara terjangkit ataupun negara tidak terjangkit dengan maksud mencegah masuknya penyakit karantina dan penyakit menular tertentu. Hasil kegiatan pengawasan Kedatangan dan keberangkatan kapal dapat dilihat sebagai berikut:

Table 13. Distribusi Pengawasan Alat Angkut Tahun 2024
di Wilker BKK Kelas II Sorong

No	Wilayah Kerja	Kedatangan alat angkut dari			Keberangkatan alat angkut ke		
		DN	LN	%	DN	LN	%
1	Pelabuhan Sorong (Induk)	8,302	51	39	8,301	39	39
2	Pelabuhan Fakfak	648	0	3	653	0	3
3	Pelabuhan Kaimana	514	0	2	514	0	2
4	Pelabuhan Raja Ampat	3,063	2	14	3,064	1	14
5	Pelabuhan Khusus Arar dan Sele	2,029	7	10	2,031	2	10
6	Pelabuhan Teminabuan	56	0	0.26	49	0	0.23
7	Bandara	6,497	0	31	6,497	0	31
JUMLAH		21,109	60	100	21,109	42	100

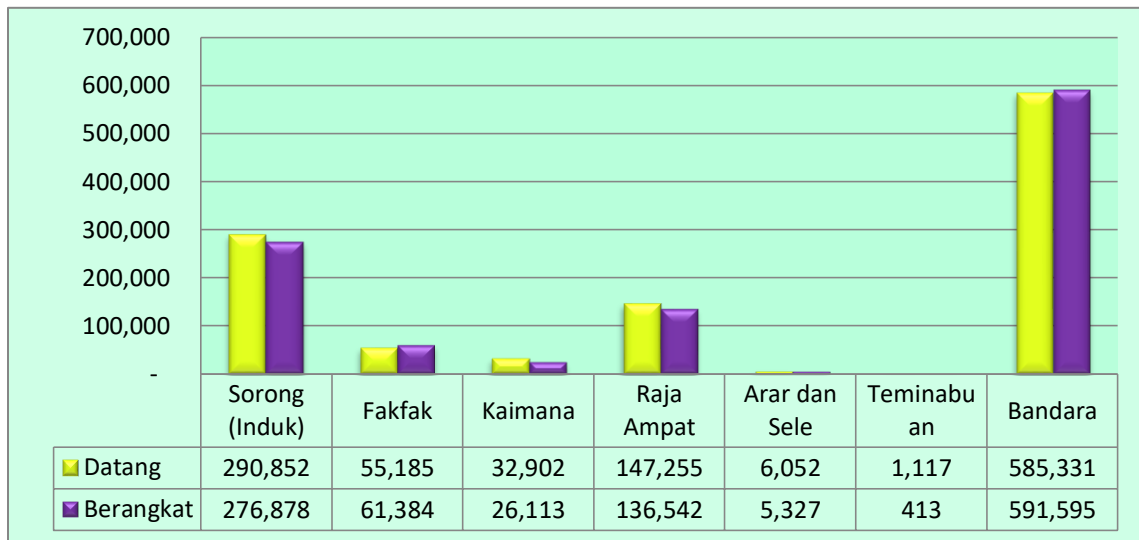
Tabel 13, diatas menunjukkan bahwa distribusi pengawasan kedatangan dan keberangkatan alat angkut dari/ke dalam negeri terbanyak di Wilker Pelabuhan Sorong dan terendah di Wilker Teminabuan dan untuk kedatangan dan keberangkatan kapal dari/ke luar negeri hanya terdapat pada Wilker Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Arar dan Pelabuhan Raja Ampat.

B. Pemeriksaan ABK dan Penumpang

Kegiatan surveilans faktor resiko alat angkut sebagai upaya Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) untuk mendeteksi dan merespon secara cepat setiap kejadian yang berkaitan dengan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pengawasan kesehatan para ABK/crew kapal, penumpang.

Penumpang, ABK/crew alat angkut dapat menjadi sumber penyebarluasan penyakit dari satu daerah ke daerah lain. Hasil kegiatan pengawasan Kedatangan dan keberangkatan penumpang, ABK/crew dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 4. Distribusi Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang Tahun 2024 BKK Kelas II Sorong



Grafik 14, diatas menunjukkan distribusi pengawasan kedatangan/keberangkatan penumpang terbanyak di wilker Bandara Deo Sorong sedangkan kedatangan dan keberangkatan penumpang paling rendah di wilker Teminabuan.

Table 14. Distribusi Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan ABK/Crew dari dalam negeri dan ke luar negeri Tahun 2024 di Wilker BKK Kelas II Sorong

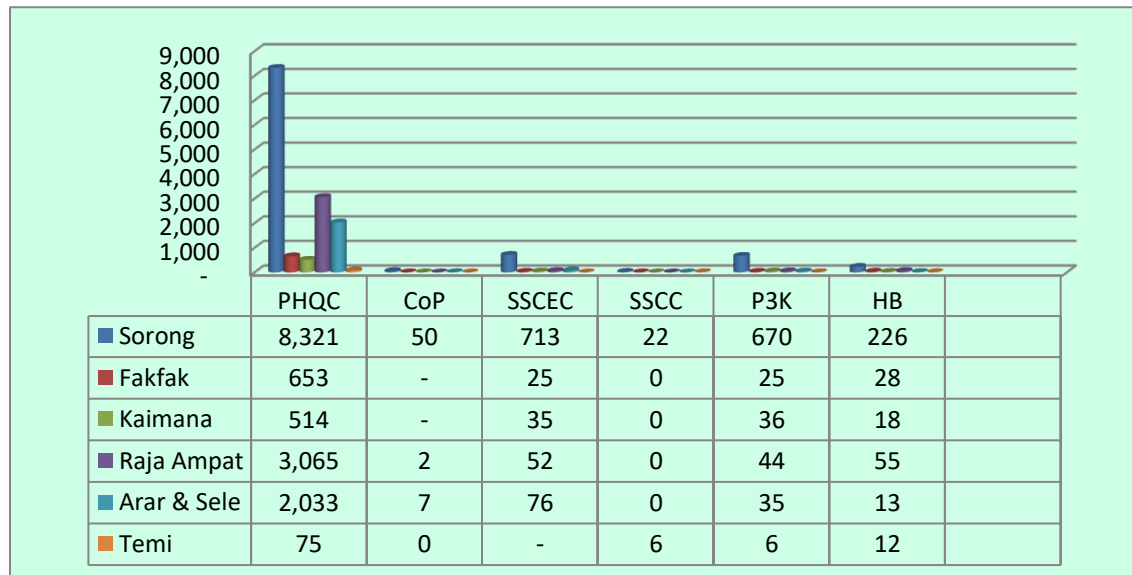
No	Wilayah Kerja	Tahun 2024			
		ABK dari		ABK ke	
		DN	LN	DN	LN
1	Sorong (Induk)	91,125	518	91,137	268
2	Fakfak	15,654	0	17,545	0
3	Kaimana	15,088	0	15,110	0
4	Raja Ampat	25,401	236	25,641	4
5	Arar dan Sele	15,013	185	15,088	81
6	Teminabuan	1,177	0	1,177	0
7	Bandara	31,854	0	31,854	0
JUMLAH		195,312	939	197,552	353

Tabel 15, diatas menunjukan distribusi pengawasan kedatangan/keberangkatan ABK/Crew dari dalam dan ke luar negeri terbanyak di wilker Sorong sedangkan kedatangan dan keberangkatan penumpang terrendah di wilker Teminabuan.

C. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina melalui penerbitan dokumen kesehatan Kapal PHQC, SSCEC/SSCC, P3K dan CoP

Lalu lintas alat angkut dan penumpang alat angkut dapat menjadi sumber penyebarluasan penyakit dari satu daerah ke daerah lain dan memegang peranan penting dalam transmisi penyakit, baik sebagai media ataupun pembawa *agent* penyakit. Untuk itu perlu upaya pengawasan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bentuk sistem kewaspadaan dini. Dalam kegiatan tersebut diatas maka BKK Kelas II Sorong melakukan Pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal diantaranya adalah

Grafik 5. Distribusi Hasil Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan PHQC, SSCEC/SSCC, P3K dan CoP di BKK Kelas II Sorong Tahun 2024



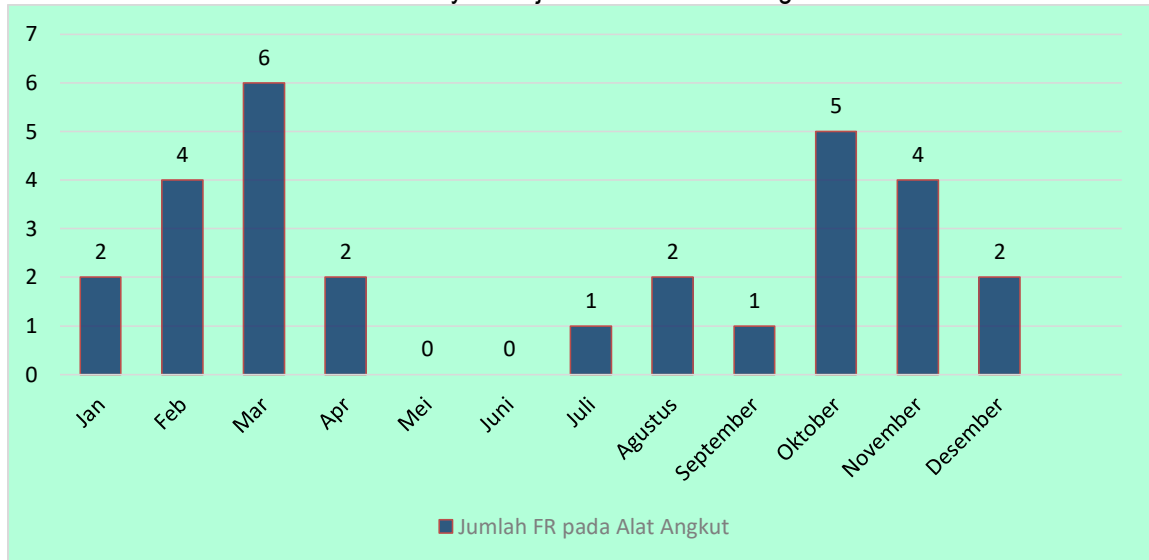
Grafik diatas menunjukkan bahwa distribusi layanan dokumen kesehatan kapal terbanyak di wilayah kerja Pelabuhan Sorong dan terendah di wilayah kerja Teminabuan.

D. Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko Pada Alat Angkut

Kegiatan pengendalian alat angkut dilakukan jika ditemukan keberadaan vector dan binatang pembawa penyakit pada alat angkut saat dilakukan pemeriksaan kesehatan. Alat angkut dinyatakan tidak sehat karena berisiko dapat menularkan penyakit seperti ditemukan adanya tikus dan serangga tular vektor atau ditetapkan sebagai kapal terjangkit penyakit menular potensial PHEIC. Alat angkut yang dinyatakan berisiko maka terlebih dahulu harus

dilakukan tindakan penyehatan dan kemudian diberikan dokumen SSCC. Kegiatan pengendalian yang dilakukan diantaranya adalah deratisasi, desinseksi dan fumigasi. Pada tahun 2024 BKK Kelas II Sorong mendapatkan 14 alat angkut yang ditemukan keberadaan vector sehingga dilakukan tindakan penyehatan dan penerbitan dokumen SSCC. Distribusi jumlah alat angkut yang ditemukan adanya vector dan binatang pembawa penyakit dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 6. Jumlah Alat Angkut yang ditemukan Adanya Vektor dan BPP di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong

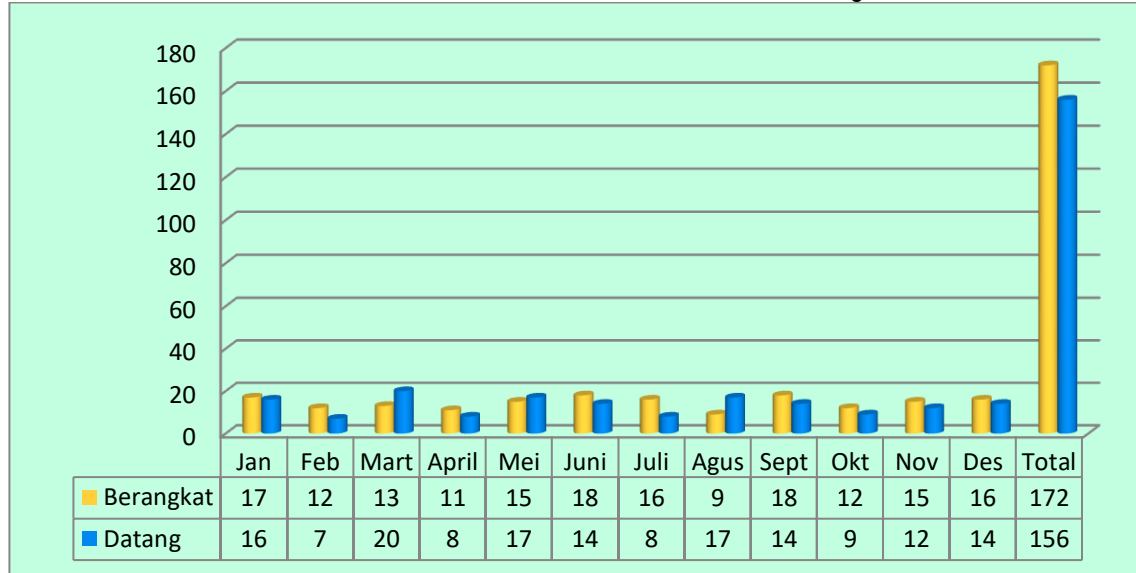


Dari grafik diatas diketahui bahwa terdapat 29 alat angkut yang berisiko karena ditemukan adanya vector dan binatang pembawa penyakit pada saat pemeriksaan kesehatan. Vektor dan binatang pembawa penyakit dominan yang ditemukan adalah kecoa dan tikus dan dilakukan upaya pengendalian berupa tindakan desinseksi/fumigasi.

E. Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Melalui Barang (jenazah/kerangka/abu)

Pengawasan di pintu masuk dan keluar dilakukan terhadap orang, alat angkut dan barang. Pengawasan pada orang selain pada manusia hidup dilakukan pada jenazah karena jenazah dengan sebab kematian penyakit menular apabila tidak dilakukan pengawasan dapat menularkan penyakit menular seperti jenazah dengan sebab kematian Flu Burung/SARS. Covid-19 dan penyakit menular lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan pengawasan dokumen kelengkapan jenazah yaitu surat keterangan sebab kematian dari rumah sakit/dinas kesehatan, certificate of embalming, surat keterangan krematorium, keterangan pemetian, rekomendasi kepolisian dan izin angkut jenazah yang diterbitkan oleh BBKK dan BKK. Hasil Pengawasan Jenazah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 7. Distribusi Pengawasan Keberangkatan dan Kedatangan Jenazah Tahun 2024 di Wilker BKK Kelas II Sorong



Dari grafik diatas diketahui bahwa pengawasan faktor risiko kesehatan melalui keberangkatan jenazah tertinggi di bulan Juni dan september dan yang terendah bulan agustus sedangkan pada kedatangan jenazah terbanyak di bualan Mei dan Agustus dan terendah di bulan Februari.

F. Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko Pada Barang

Seluruh tindakan pengawasan barang yang tiba dan berangkat di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong pada periode tahun 2024 merupakan kategori lalu-lintas jenazah/kerangka dan pengiriman sampel. Hasil pengawasan menunjukan seluruh pengawasan pengakutan jenazah/kerangka dan pengiriman sampel (100%) tidak ditemukan adanya factor risiko.

4.4 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN

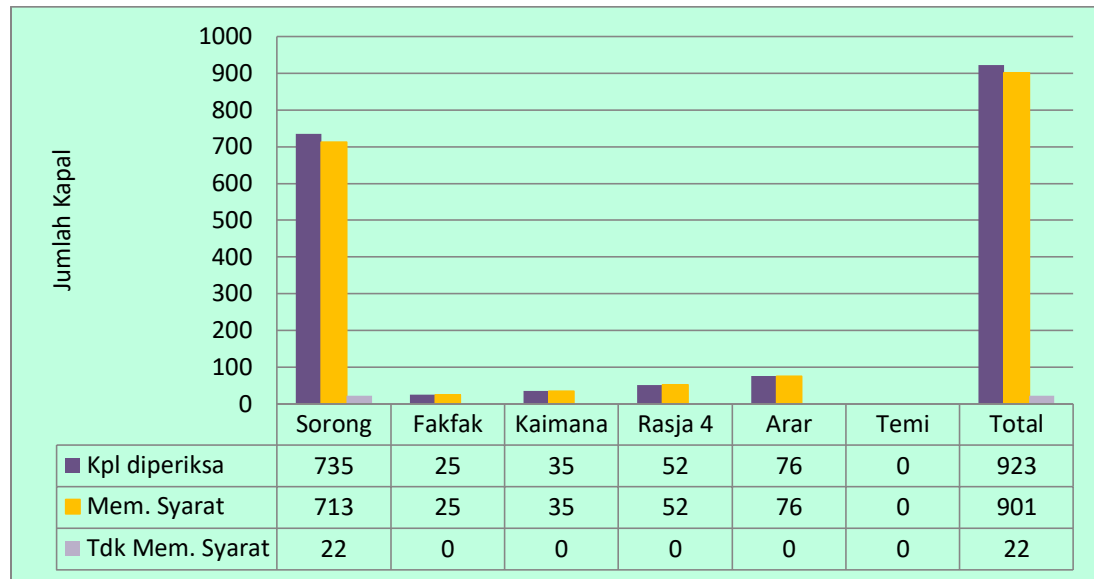
Pencapaian Program Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan yang telah dilaksanakan oleh BKK Kelas II Sorong pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Higiene Sanitasi Kapal

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta IHR 2005, maka setiap kapal yang datang dari dalam dan luar negeri (dalam karantina) harus dilakukan pemeriksaan higiene sanitasi kapal, yaitu untuk mengamati faktor risiko yang terdapat dalam alat angkut yang dapat terbawa oleh media lingkungan dan vektor serta binatang pembawa penyakit. Hal ini sejalan dengan kegiatan BKK kelas II Sorong adalah

menyelenggarakan fungsi pengawasan hygiene sanitasi kapal, karena kapal termasuk salah satu faktor risiko yang dapat menjadi sumber penularan penyakit menular atau kontaminasi termasuk vektor dan reservoir.

Grafik 8. Distribusi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Higiene Sanitasi Kapal

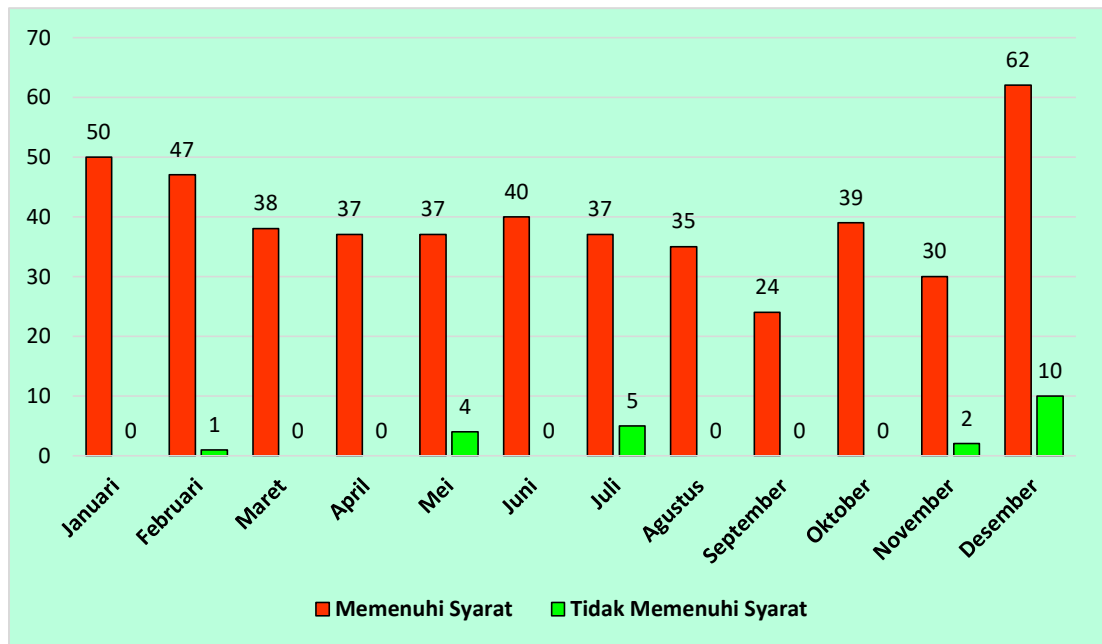


Berdasarkan grafik diatas menunjukkan hasil pengawasan dan pemeriksaan higiene sanitasi alat angkut (kapal) di wilayah BKK Sorong tahun 2024, yaitu jumlah kapal yang diawasi (diperiksa) sebanyak 923 kapal dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 901 kapal dan kapal yang tidak memenuhi syarat sebanyak 22 kapal. Kapal yang tidak memenuhi syarat dilakukan tindakan karantina yaitu fumigasi dan disinfeksi.

2. Pemeriksaan Faktor Risiko pada Tempat Pengolahan Pangan (TPP)

Pemeriksaan tempat pengolah makanan dilakukan setiap bulan pada semua TPP yang berada di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong dengan melakukan kunjungan langsung ke TPP seperti restoran, rumah makan, kantin dan pedagang makanan jajanan baik di lingkungan Bandara maupun di lingkungan pelabuhan. Penilaian TPP mengacu pada Kepmenkes No.1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi jasa Boga, Kepmenkes RI No 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan, dan Kepmenkes No 1098/Menkes/SK/VII/ 2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Indikator/kriteria dinilai antara lain kondisi halaman, letak bangunan, konstruksi bangunan, sarana air, sarana pencucian, penyimpanan alat, penyimpanan makanan, sarana pembuangan sampah, WC/urinoir, kondisi alat dan kondisi penjamah makanan.

Grafik 9. Pengawasan Tempat Pengolahan Pangan (TPP) di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024



Pengawasan TPP di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong periode tahun 2024 dilakukan pada 493 tempat. Terdapat 22 lokasi TPP yang tidak memenuhi syarat (mengacu pada formulir pemeriksaan yang digunakan) umumnya disebabkan oleh kurangnya kebersihan lingkungan dan fasilitas sanitasinya seperti tempat cuci piring, tempat pembuangan sampah dan saluran air limbah tidak memenuhi syarat.

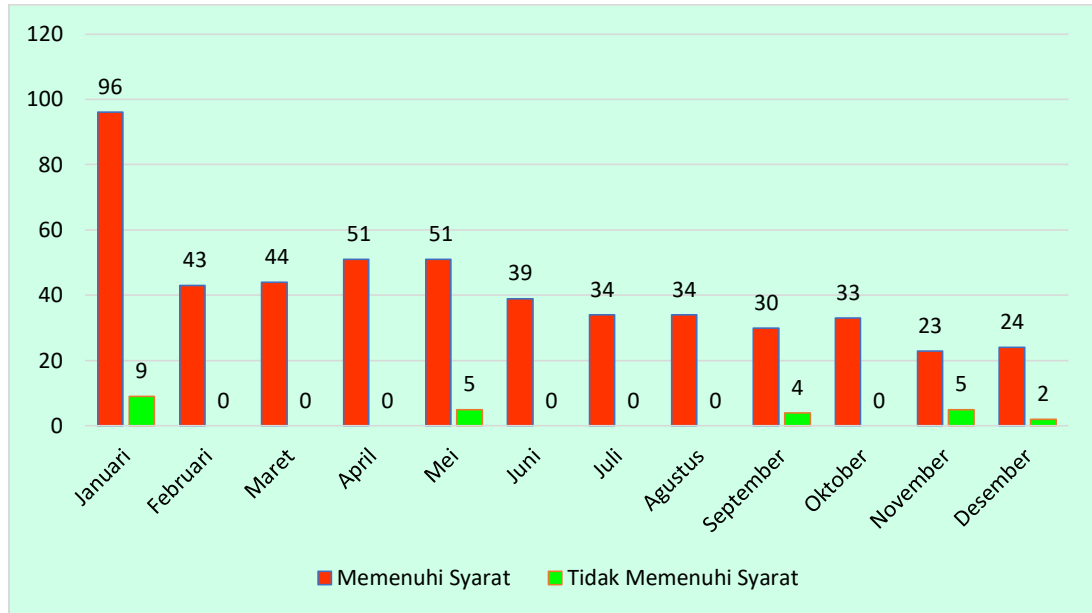
3. Pemeriksaan Air Bersih

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam mencegah penularan penyakit melalui air adalah kondisi sanitasi Sarana Air Bersih (SAB) termasuk di dalamnya pengawasan terhadap sisa chlor dan pH. Sasaran kegiatan pengawasan ini adalah kran/hydran, reservoir dan mobil tangki air.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 431/Menkes/SK/IV/ 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / Pos Lintas Batas dalam rangka Karantina Kesehatan, maka sisa Chlor yang diijinkan tidak boleh kurang dari 0,2 dan pH yang diijinkan berkisar antara 6,5 – 8,5 sesuai dengan Permenkes RI No. 32 Th 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Hygiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum. Target pemeriksaan Sanitasi Sisa Chlor & pH adalah 84 sampel/tahun yang terbagi di 7 wilayah kerja

dengan total SAB 1.258. Adapun jumlah sumber air bersih yang dilakukan pemeriksaan selama periode tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 10. Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024



Hasil pemeriksaan terhadap sampel air bersih periode tahun 2024 di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong memenuhi terhadap parameter pH dan Chlor namun tidak memenuhi syarat untuk hasil pemeriksaan bakteriologis. Selama tahun 2024 dari 513 SAB yang dilakukan pemeriksaan terdapat 25 SAB yang tidak memenuhi syarat bakteriologis. Air bersih yang memenuhi syarat parameter Chlor menandakan air bersih memiliki daya desinfektan yang baik terhadap cemaran bakteriologis. Sedangkan parameter pH yang memenuhi syarat menandakan keseimbangan system asam dan basa serta unsur kimia dalam air maupun sebagai indikator awal terhadap risiko cemaran kimia.

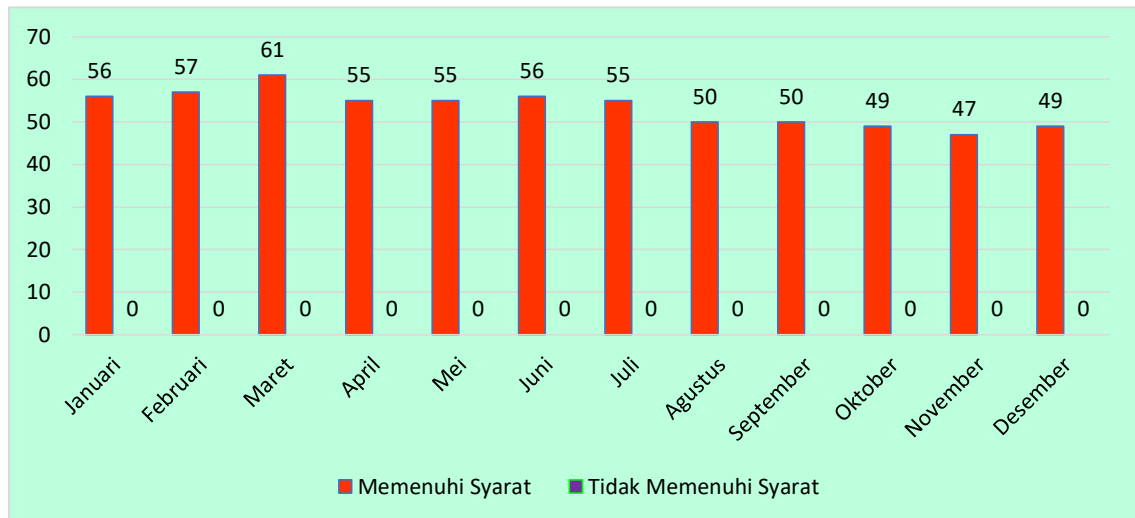
4. Pemeriksaan Faktor Risiko pada Tempat-Tempat Umum (TTU)

Pemeriksaan sanitasi bangunan dilaksanakan di semua wilker BKK Kelas II Sorong secara rutin setiap bulan dengan melakukan inspeksi sanitasi pada bangunan umum, perkantoran, gudang, terminal, dan bangunan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kepelabuhan/kebandaraan.

Adapun yang diperiksa antara lain kondisi halaman, ruang bangunan, penyehatan air, penyehatan udara ruang, pengelolaan limbah, pencahayaan, kebisingan pada ruang kerja, getaran di ruang kerja, pengendalian vektor, kondisi instalasi, pemeliharaan jamban dan kamar

mandi. Pemeriksaan sanitasi bangunan dilaksanakan rutin setiap bulan pada semua bangunan yang ada di wilayah kerja Pelabuhan dan Bandara.

Grafik 11. Pengawasan TTU di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024



Pengawasan TTU di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong pada periode tahun 2024 dilakukan pada 640 bangunan. Pengawasan TTU terbanyak dilakukan pada bulan Maret 2024 yaitu sejumlah 61 bangunan. Seluruh TTU yang dilakukan pemeriksaan sanitasi dinyatakan memenuhi syarat. Terdapat beberapa poin pemeriksaan pada kondisi halaman, ruang bangunan, penyehatan air, penyehatan udara ruang, pengelolaan limbah, pencahayaan, kebisingan pada ruang kerja, getaran di ruang kerja, pengendalian vektor, kondisi instalasi, pemeliharaan jamban dan kamar mandi yang tidak memenuhi syarat.

5. Pemeriksaan Faktor Risiko pada Keberadaan Vektor Penyakit

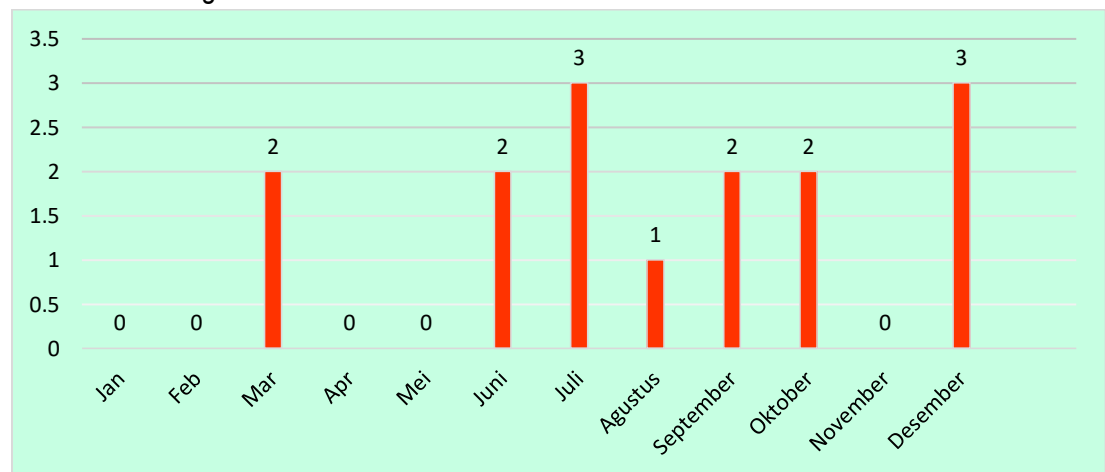
Pemeriksaan faktor risiko keberadaan vector dilakukan terhadap beberapa jenis vector penyakit meliputi survey vector DBD, survey vector Pes, survey vector Malaria, dan survey vector Diare. Pemeriksaan factor risiko keberadaan vector dilakukan pada 7 wilayah kerja di BKK Kelas II Sorong. Pada masing-masing wilayah kerja dilakukan pemeriksaan keberadaan vector pada alat angkut kapal/pesawat dan wilayah perimeter maupun buffer selama periode tahun 2024. Hasil survey keberadaan vector dibandingkan dengan standar pada Permenkes No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya. Adapun pemeriksaan factor risiko keberadaan vector secara keseluruhan di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong yaitu total sebanyak 84 lokus.

6. Pengendalian Nyamuk Aedes Aegypti di Lingkungan Buffer dan Perimeter BKK Kelas II Sorong.

Apabila hasil survey nyamuk DBD menunjukkan nilai HI di daerah perimeter > 0 dan HI di buffer > 1 serta ditemukan kasus yang terindikasi penularan DBD di wilayah kerja berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi maka perlu dilakukan pengendalian terhadap vector DBD. Metode pengendalian vector DBD yang diaplikasikan di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong menggunakan metode pengasapan (fogging). Metode fogging menggunakan insektisida yang diaplikasikan berdasarkan hasil survey dan keamanan saat pengaplikasiannya. Hasil survey factor risiko nyamuk Aedes Aegypti di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong tahun 2024 ditemukan adanya factor risiko di 15 lokasi focus baik buffer maupun perimeter.

Tindakan pengendalian factor risiko yang telah dilakukan oleh BKK Kelas II Sorong adalah dengan melakukan intervensi pengasapan sesuai dosis yaitu di 15 lokasi focus tersebut. Tindakan pengendalian vector nyamuk Aedes Aegypti sepanjang tahun 2024 dapat dikendalikan 100%. Berikut distribusi jumlah lokasi focus sepanjang tahun 2024 di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong yang dilakukan pengendalian nyamuk Aedes Aegypti:

Grafik 12. Pengendalian Faktor Risiko Nyamuk Aedes Aegypti di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024

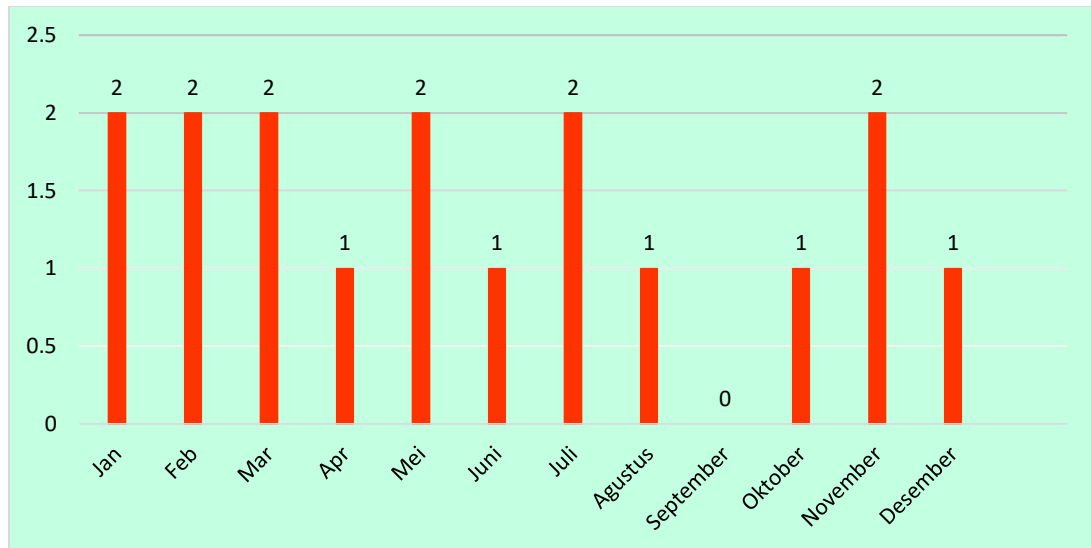


7. Pengendalian Nyamuk Malaria di Lingkungan Buffer dan Perimeter BKK Kelas II Sorong

Dalam layanan pengendalian vector Malaria di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong sepanjang tahun 2024 didasarkan pada hasil survey vector nyamuk Anopheles. Pelaksanaan survey dilaksanakan pada fase larva dengan metode survey indeks habitat perindukan. Pengendalian nyamuk dewasa dilakukan di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong secara kimiawi dengan metode Indoor Residual Spraying (IRS).

IRS dilakukan pada bangunan baik daerah perimeter maupun buffer yang berisiko terhadap timbulnya kasus malaria. Kegiatan survey nyamuk dewasa yang dilakukan di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong periode tahun 2024 menemukan adanya factor risiko di 16 lokasi focus. Berikut distribusi jumlah lokus selama tahun 2024 di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong yang dilakukan upaya pengendalian malaria:

Grafik 13. Pengendalian Faktor Risiko Nyamuk Malaria di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024



Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepadatan populasi nyamuk Malaria diantaranya adalah Indeks Habitat Larva Anopheles > 1, hasil survey nyamuk malam menunjukkan angka gigitan nyamu Anopheles atau Man Biting Rate (MBR) > 0,025, perilaku masyarakat keluar pada malam hari tanpa menggunakan repelen atau baju yang menutupi badan, ventilasi rumah terbuka atau tidur tidak menggunakan kelambu dan tidak menggunakan insektisida rumah tangga pada malam hari. Tindakan pengendalian factor risiko yang telah dilakukan oleh BKK Kelas II Sorong adalah dengan melakukan intervensi IRS sesuai dosis di 16 lokasi focus di seluruh wilayah kerja BKK Kelas II Sorong baik wilayah buffer maupun perimeter. Tindakan pengendalian nyamuk malaria selama tahun 2024 dapat dikendalikan 100%.

8. Pengendalian Vektor Diare (Lalat) di Lingkungan Buffer dan Perimeter BKK Kelas II Sorong

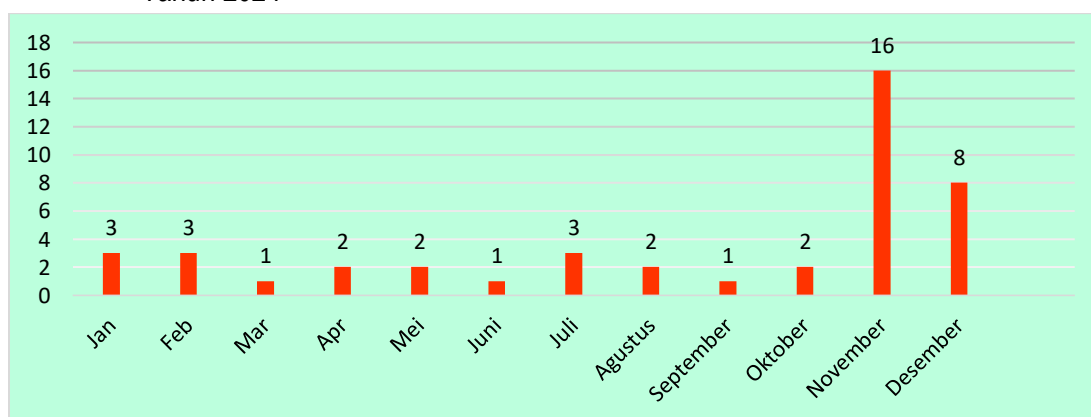
Layanan survei vektor diare dilaksanakan dengan survei kepadatan lalat dan kecoa di seluruh wilayah kerja BKK Kelas II Sorong selama tahun 2024. Pengamatan kepadatan lalat dilakukan dengan menggunakan flygrill yang didasarkan pada sifat lalat yang cenderung untuk hinggap pada tepi-tepi atau tempat yang bersudut dalam kurun waktu tertentu dan lem kecoa. Flygrill dan lem kecoa diletakkan di tempat-tempat yang berdekatan dengan tempat sampah, kotoran hewan, kandang, dan lainnya.

Jumlah lalat yang hinggap dihitung selama 30 detik. Perhitungan ini dilakukan sebanyak 10 kali di setiap titik pengamatan. 5 perhitungan tertinggi dibuat rata-ratanya dan dicatat dalam kartu pengamatan. Angka rata-rata ini merupakan indeks dalam lokasi tersebut dan diinterpretasikan sebagai berikut:

- 0 – 2 : Rendah
- 3 – 5 : Sedang
- 6 – 20 : Tinggi
- ≥ 21 : Sangat Tinggi

Kegiatan survey lalat yang dilakukan di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong selama tahun 2024 menemukan adanya factor risiko di 44 lokus. Tindakan pengendalian factor risiko yang telah dilakukan oleh BKK Kelas II Sorong adalah dengan melakukan intervensi berupa Spraying insektisida sesuai dosis di 44 lokasi focus di seluruh wilayah kerja BKK Kelas II Sorong baik wilayah buffer maupun perimeter. Tindakan pengendalian vector lalat sepanjang selama 2024 dapat dikendalikan 100%.

Grafik 14. Pengendalian Faktor Risiko Vektor Lalat di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong Tahun 2024

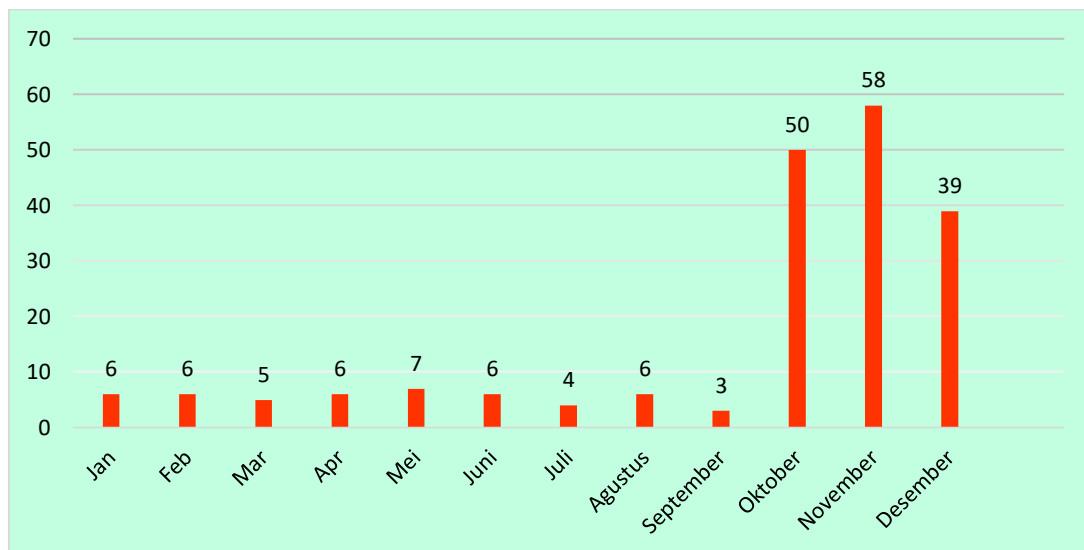


9. Pengendalian Vektor Pes di Lingkungan Buffer dan Perimeter BKK Kelas II Sorong

Keberadaan binatang pembawa penyakit di lingkungan Pelabuhan dan Bandara dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat salah satunya yaitu keberadaan tikus. Tikus merupakan reservoir pembawa berbagai penyakit salah satunya Leptospirosis. Selain itu, tikus merupakan inang dari vector pes yaitu pinjal. Pengendalian terhadap tikus secara tidak langsung juga mengendalikan vector pes. Prosedur survey tikus dilakukan dengan identifikasi lokasi yang berpotensi menjadi tempat keberadaan tikus seperti Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Gudang, dermaga dan terminal Pelabuhan/Bandara. Pada lokasi yang berpotensi dilakukan pemasangan perangkat baik di dalam maupun di luar bangunan. Tikus yang tertangkap dilakukan identifikasi spesies dan pemeriksaan terhadap kemungkinan keberadaan pinjal.

Hasil survey vector tikus di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong selama tahun 2024 ditemukan adanya factor risiko di 190 lokasi focus. Berikut ini ada grafik sebaran lokasi focus yang menjadi factor risiko selama tahun 2024:

Grafik 15. Faktor Risiko Tikus yang Dikendalikan di BKK Kelas II Sorong Tahun 2024



Tindakan pengendalian factor risiko yang telah dilakukan oleh BKK Kelas II Sorong adalah dengan melakukan intervensi pemasangan perangkat dan identifikasi di 190 lokasi focus di seluruh wilayah kerja BKK Kelas II Sorong baik wilayah buffer maupun perimeter. Tindakan pengendalian tikus selama tahun 2024 dapat dikendalikan 100% dengan metode pemasangan perangkat.

4.5 PENCAPAIAN PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG KEGAWATDARURATAN DAN SITUASI KHUSUS

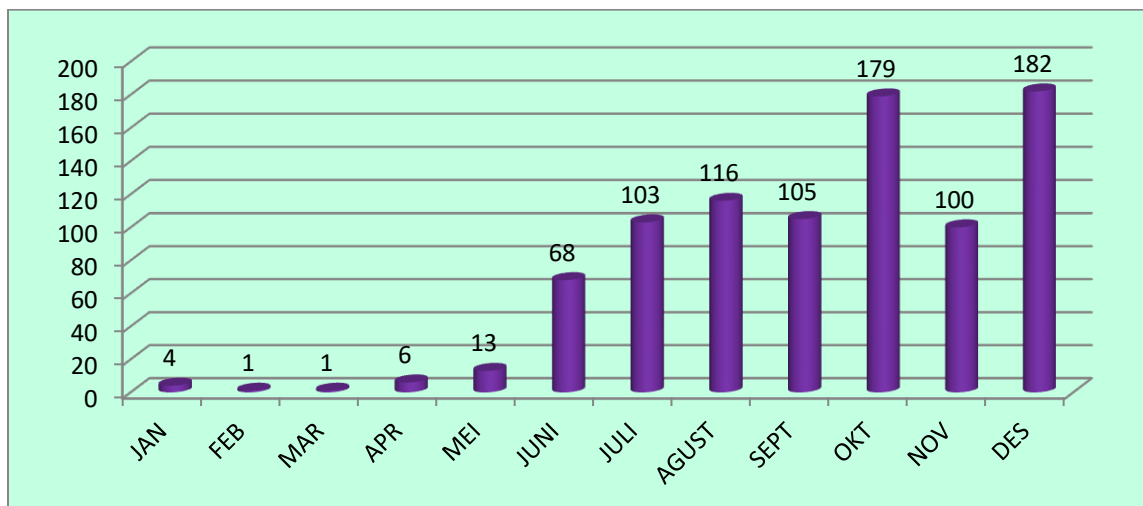
Pencapaian kinerja Tim Kerja 4 Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan ICV di BKK Sorong Tahun 2024

ICV (International Certificate of Vaccination) merupakan sertifikat yang diakui secara internasional setelah dilakukan vaksinasi tertentu yang disyaratkan bagi perjalanan internasional. Sehubungan dengan telah diberlakukannya ketentuan kewajiban Vaksinasi Meningitis Meningococcus bagi pelaku perjalanan yang akan bepergian ke Arab Saudi yang dikeluarkan oleh Otoritas Kesehatan Saudi Arabia. Pada bulan Juli 2024 Kementerian Kesehatan RI melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 menetapkan bahwa tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Meningococcus bagi jamaah Haji dan Umrah tanggal 11 Juli 2024.

Ketetapan Surat Edaran Kemenkes tersebut tentu saja berdampak terhadap permintaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi Meningitis Meningokokokus dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV). Pada tahun 2024 pelayanan vaksinasi Meningitis Meningokokokus dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) di BKK Kelas II Sorong secara signifikan meningkat bila dibanding dengan tahun 2023. dengan penerbitan ICV berjumlah 148 sertifikat, sedangkan pada tahun 2024 jumlah penerbitan sertifikat ICV 879 sertifikat.

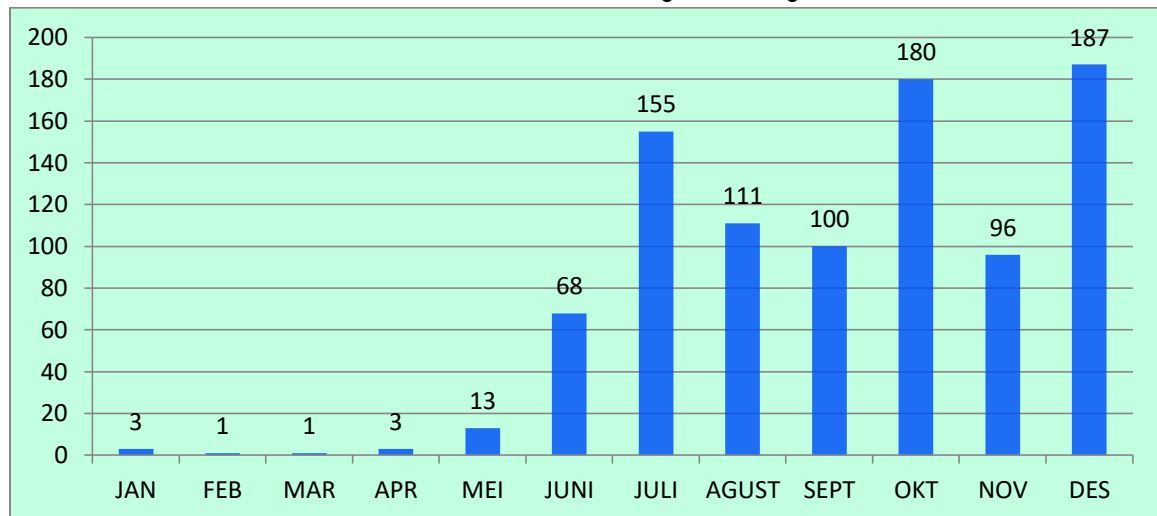
Grafik 16. Distribusi Penerbitan ICV (International Certificate of Vaccination)



Pada Grafik diatas menunjukkan bahwa penerbitan ICV BKK Sorong pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebanyak 879 ICV yang diterbitkan, dan jumlah penerbitan ICV paling sedikit pada Bulan Februari dan Maret sebanyak 1 buku. Data tersebut didapat dari kantor Induk. Pada tahun 2024 tidak ada wilker yang melakukan penerbitan ICV.

2. Pemakaian Vaksin Meningitis Meningococcus di Wilayah Kerja BKK Sorong Tahun 2024

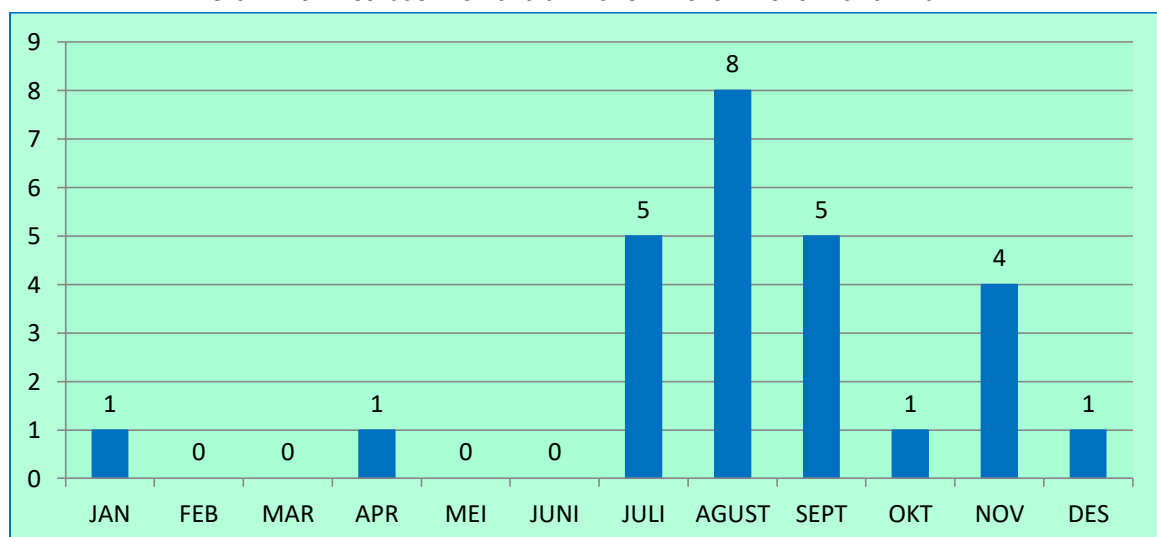
Grafik 17. Distribusi Pemakaian Vaksin Meningitis meningococcus Tahun 2024



Berdasarkan grafik Pemakaian Vaksin Meningitis *Meningococcus* BKK Sorong Tahun 2024 didapatkan hasil Pemakaian Vaksin Meningitis Meningococcus terbanyak berdasarkan bulan berada di bulan Desember dengan jumlah 187, sementara pemakaian Vaksin Meningitis *Meningococcus* terkecil berdasarkan bulan berada di bulan Februari dan Maret dengan jumlah 1.

3. Pemakaian Vaksin Yellow Fever di Wilayah Kerja BKK Sorong Tahun 2024

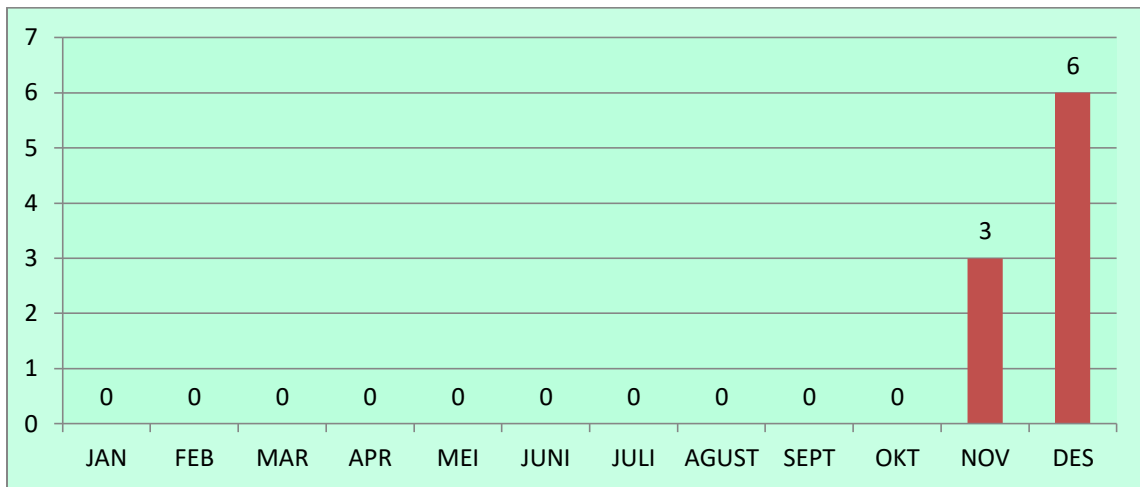
Grafik 18. Distribusi Pemakaian Vaksin Yellow Fever Tahun 2024



Berdasarkan grafik Pemakaian Vaksin Yellow Fever BKK Sorong Tahun 2024 didapatkan hasil Pemakaian Vaksin Yellow Fever terbanyak berdasarkan bulan berada di bulan Agustus dengan jumlah 8, sementara pemakaian Vaksin Yellow Fever terkecil berdasarkan bulan berada di bulan Januari, April, Oktober dan Desember dengan jumlah 1.

4. Pemakaian Vaksin Influenza di Wilayah Kerja BKK Sorong Tahun 2024

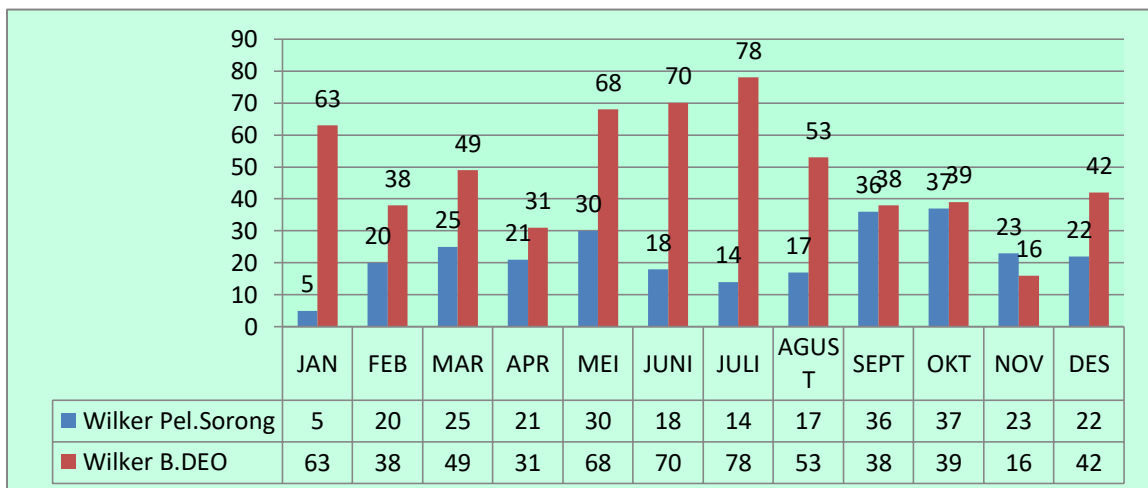
Grafik 19. Distribusi Pemakaian Vaksin Influenza Tahun 2024



Berdasarkan grafik Pemakaian Influenza Fever BKK Sorong Tahun 2024 didapatkan hasil Pemakaian Vaksin Influenza hanya terdapat di bulan berada di bulan November dan Desember dengan jumlah 9.

5. Jumlah Kunjungan Klinik Wilayah Kerja Pelabuhan Sorong dan Bandara DEO Sorong di BKK Sorong Tahun 2024

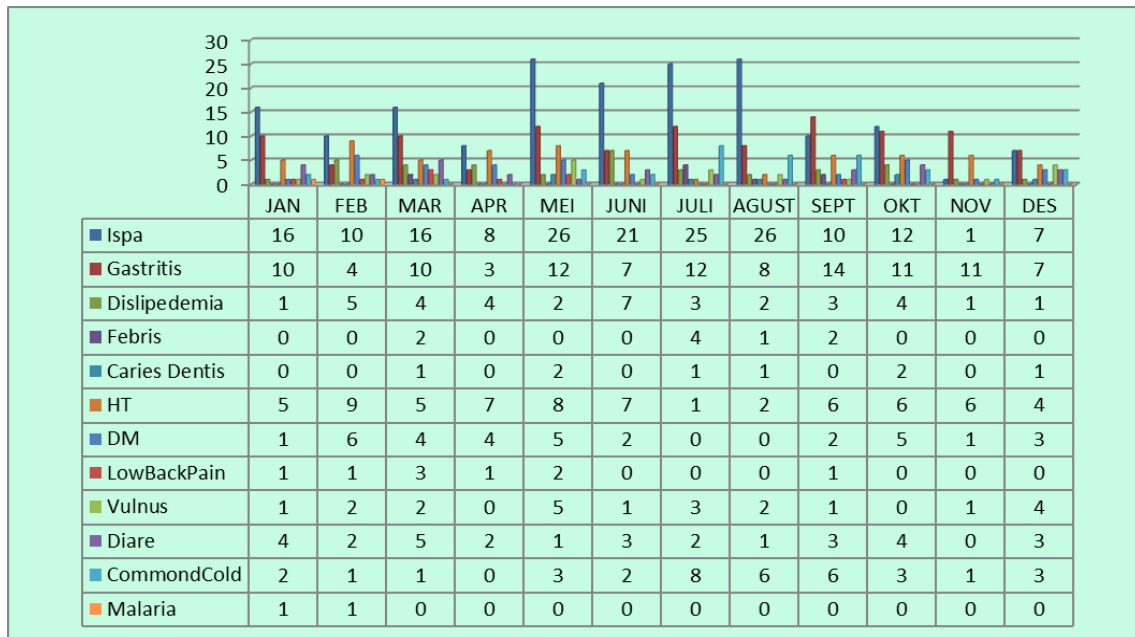
Grafik 20. Distribusi Jumlah Kunjungan Klinik



Berdasarkan grafik jumlah kunjungan klinik BKK Sorong Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan klinik Tahun 2024 terbanyak berada di wilayah kerja Bandara DEO sebanyak 585

orang, sementara jumlah kunjungan klinik Tahun 2024 terkecil berada di wilayah Pelabuhan Sorong sejumlah 268 orang.

Grafik 21. Distribusi Jumlah Kunjungan Klinik Berdasarkan Kasus Penyakit

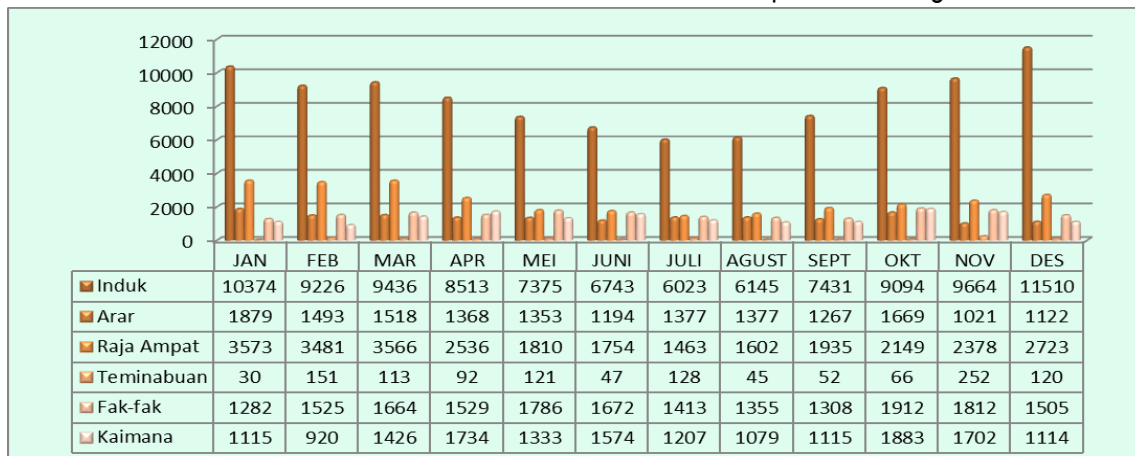


Grafik Jumlah Kunjungan Poliklinik berdasarkan kasus penyakit menunjukkan bahwa:

- Jumlah kunjungan poliklinik kasus penyakit terbanyak di BKK Sorong Tahun 2024 adalah ISPA dengan jumlah 178 kasus, sementara jumlah kunjungan poliklinik kasus penyakit paling sedikit di BKK Sorong Tahun 2024 adalah Malaria dengan jumlah 2 kasus
- Jumlah kunjungan poliklinik Tahun 2024 terbanyak berada pada bulan Mei sebanyak 66 kunjungan. Sementara jumlah kunjungan poliklinik Tahun 2024 terkecil berada pada bulan November sebanyak 16 kunjungan.

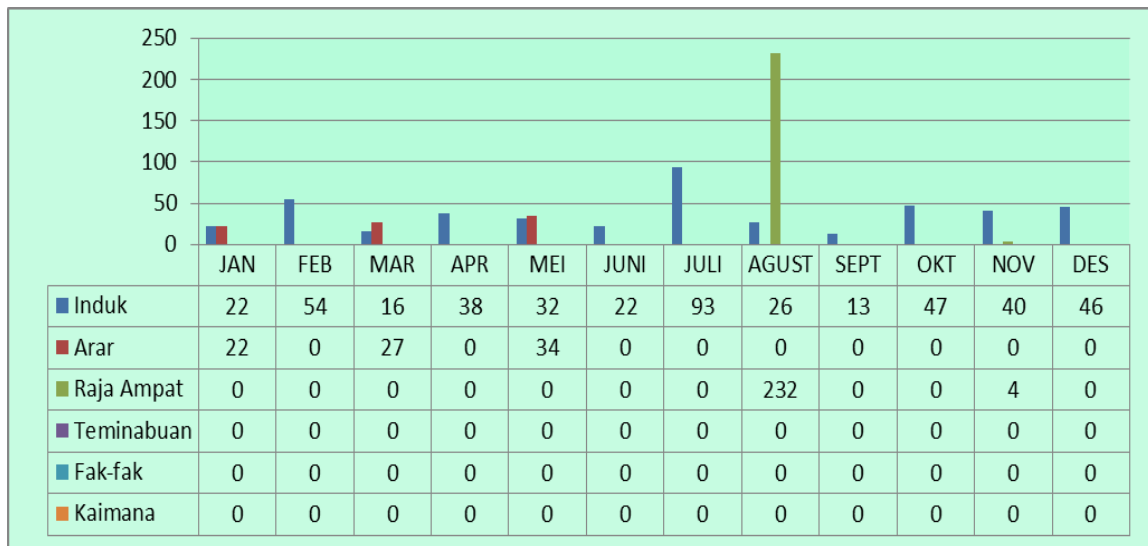
6. Jumlah Pemeriksaan ABK Dalam Negeri dan ABK Luar Negeri

Grafik 22. Distribusi Jumlah Pemeriksaan ABK Kapal Dalam Negeri



Grafik menunjukkan Jumlah pemeriksaan ABK dalam negeri terbanyak berdasarkan Wilayah kerja, terdapat di Wilayah Induk BKK Sorong dengan jumlah 101.534 ABK, sementara jumlah pemeriksaan ABK dalam negeri terendah berada di Wilayah Kerja Teminabuan sejumlah 1217 ABK. Sedangkan berdasarkan waktu grafik menunjukkan pemeriksaan ABK dalam negeri terbanyak pada bulan Januari dan desember dan terendah pada bulan juli dan agustus.

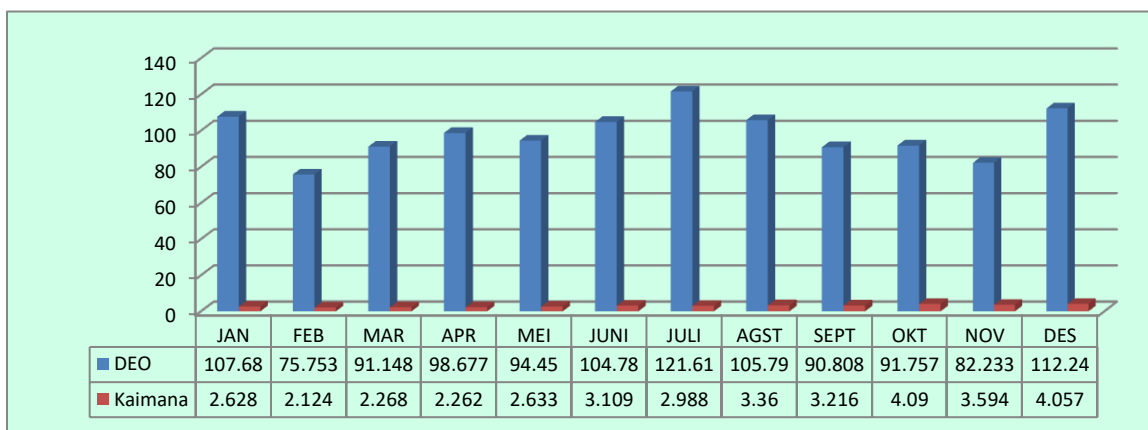
Grafik 23. Distribusi Jumlah Pemeriksaan ABK Kapal Luar Negeri



Grafik diatas menunjukkan bahwa pemeriksaan ABK luar negeri hanya terdapat diwilayah kerja Pelabuhan Sorong, Arar dan Raja Ampat.

7. Jumlah Pengawasan Tiba dan Berangkat Penumpang Pesawat.

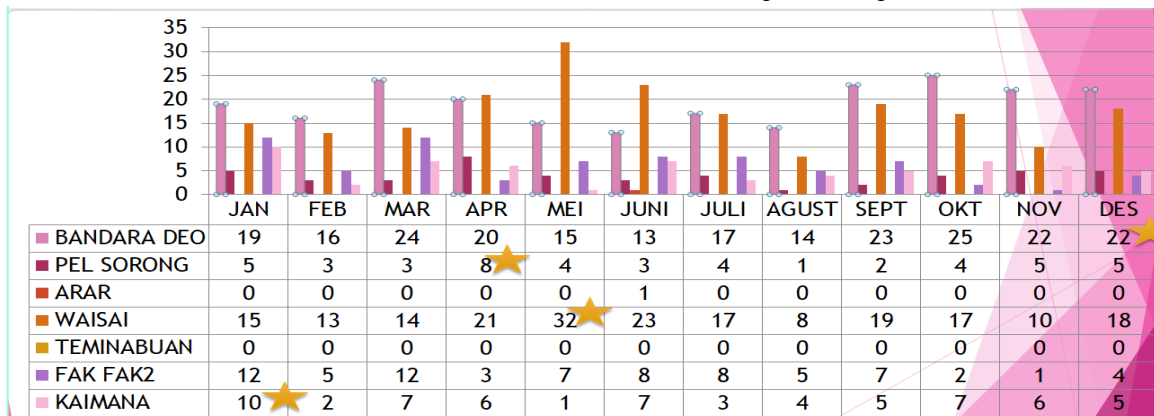
Grafik 24. Distribusi Jumlah Pengawasan Tiba dan Berangkat Penumpang Pesawat



Grafik menunjukkan bahwa jumlah pengawasan Tiba Berangkat penumpang pesawat di wilayah BKK Sorong Tahun 2024 berdasarkan wilayah terbanyak ada pada Bandara DEO sejumlah 1.176.926 orang, sementara jumlah pengawasan Tiba Berangkat penumpang Pesawat Tahun 2024 yang terendah pada bulan Februari sejumlah 77.877 orang.

8. Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit

Grafik 25. Distribusi Penerbitan Izin Angkut Orang Sakit



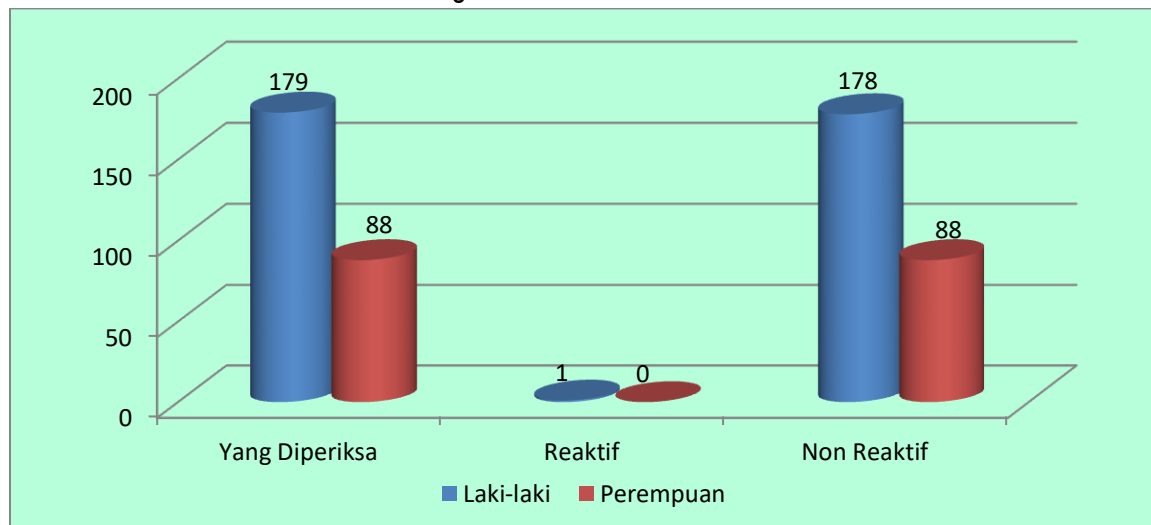
J

Grafik menunjukkan bahwa jumlah penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit Tahun 2024 berdasarkan wilayah kerja, penerbitan terbanyak terdapat di Waisai Rajaampat sebanyak 32 surat, sementara Wilayah Kejra Pelabuhan Teminabuan tidak terdapat penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit sedangkan Jumlah penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit Tahun 2024 berdasarkan waktu penerbitan terbanyak berada di bulan Januari sejumlah 61 kasus, dan terkecil pada bulan Agustus sejumlah 32 kasus.

9. Capain Skiring HIV/AIDS

Distribusi Capaian Skrining HIV/ AIDS di Wilayah Kerja BKK Sorong Tahun 2024

Grafik 26. Distribusi Skrining HIV/AIDS Berdasarkan Penemuan Kasus Positif



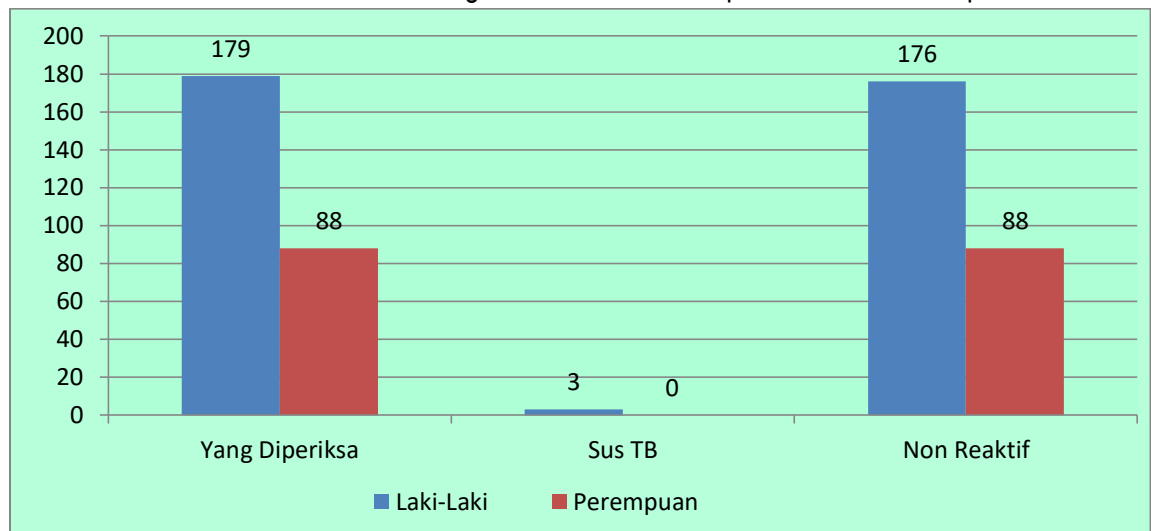
Dari grafik diatas dapat dilihat hasil pemeriksaan dalam penemuan kasus HIV yang ikut pemeriksaan berjumlah 267 orang, menurut jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki sebanyak 179 dan yang terkecil adalah perempuan dengan jumlah

88 orang dengan hasil reaktif sebanyak 1 orang (laki-laki) dan non reaktif sebanyak 178 orang. Hasil reaktif dilaporkan sebagai HIV kasus baru karena pasien baru tau kalau hasil pemeriksaan reaktif dan telah di edukasi untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Puskesmas.

10. Capaian Skrining TB

Distribusi Capaian Skrining TB di Wilayah Kerja BKK Sorong Tahun 2024

Grafik 27. Distribusi Skrining TB berdasarkan Susp.TB dan Bukan Susp TB

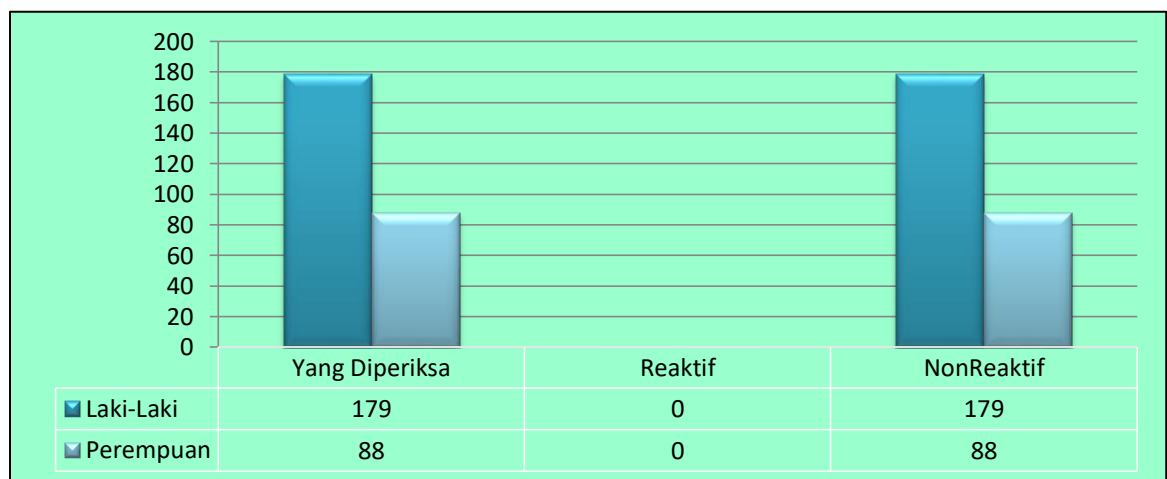


Dari grafik diatas dapat dilihat hasil pemeriksaan Skrining TB berjumlah 267 orang, dan menurut jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki sebanyak 179 orang dengan hasil Sus TB sebanyak 3 orang (laki-laki) dan yang terkecil dengan jenis kelamin perempuan jumlah 88 orang dan bukan susp TB sebanyak 264 orang.

11. Capaian Skirining Malaria

Distribusi Capaian Skrining Malaria di Wilayah Kerja BKK Sorong Tahun 2024

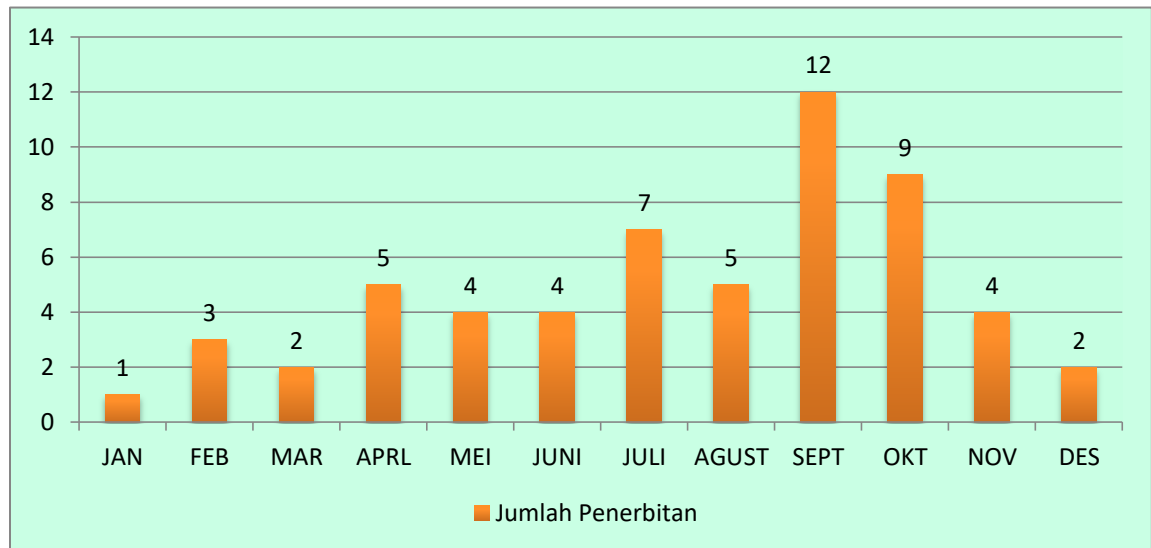
Grafik 28. Distribusi Skrining Malaria berdasarkan Reaktif dan Nonreaktif



Dari grafik diatas dapat dilihat hasil pemeriksaan Skrining Malaria berjumlah 267 orang dengan hasil Non Reaktif dan menurut jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki sebanyak 179 orang dan yang terkecil dengan jenis kelamin perempuan jumlah 88 orang.

12. Penerbitan KIR

Grafik 29. Distribusi Penerbitan KIR



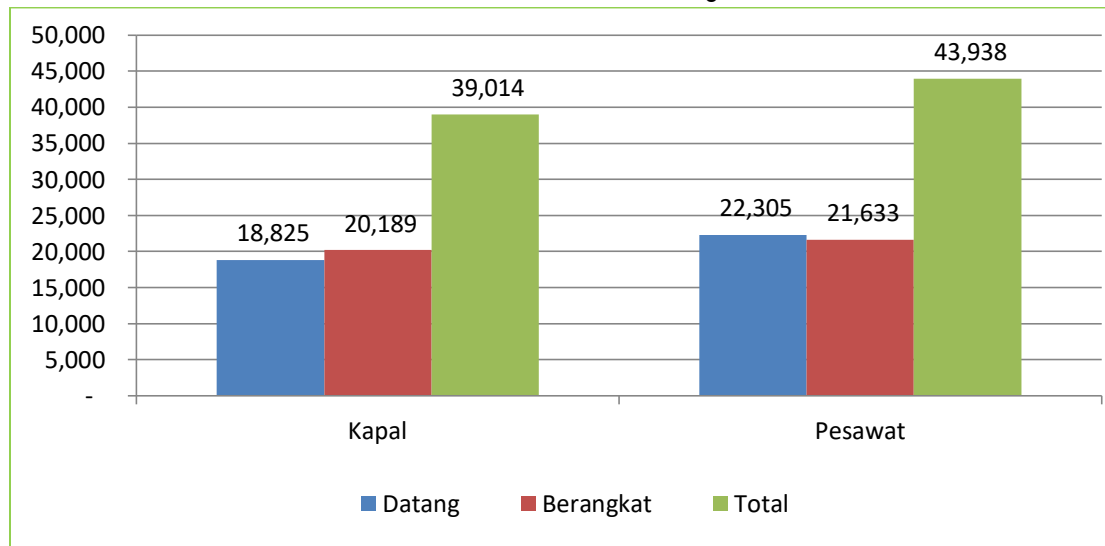
Grafik menunjukkan distribusi penerbitan KIR Tahun 2024 berdasarkan waktu penerbitan didapatkan hasil penerbitan KIR terbanyak pada bulan September dengan jumlah 12 sertifikat, sementara penerbitan KIR terkecil pada bulan Januari dengan jumlah 1 sertifikat.

13. Pengawasan Kesehatan Arus Mudik Lebaran , Natal dan Tahun Baru di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong.

- Arus Mudik dan Balik Hari Lebaran 1445 H/tahun 2024.

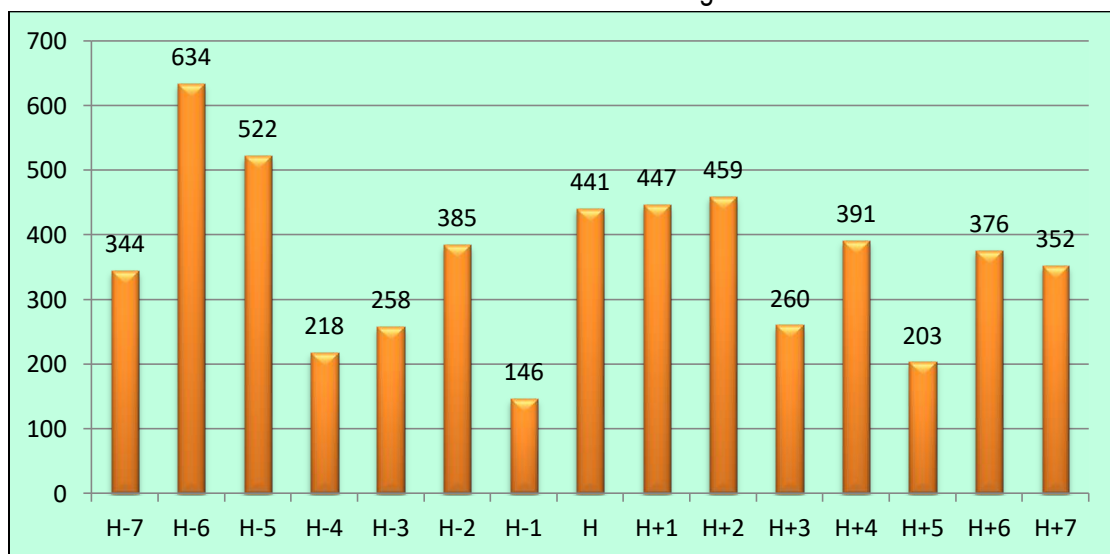
Kegiatan Pengawasan kesehatan kapal/pesawat dan penumpang dilakukan secara rutin oleh BKK sorong yaitu kapal pelni yang datang/berangkat dan fery rute sorong waisai, sorong misool yang keluar masuk melalui pelabuhan rakyat sorong dan penerbangan rute wilayah papua, makassar, ambon dan jawa dilakukan pengawasan secara langsung. Pos Pelayanan Kesehatan dilaksanakan selama 14 hari, dimulai pada H-7 Tanggal 04 April 2024 dan Berakhir pada H+7 Tanggal 17 April 2024.

Grafik 30. Distribusi Pengawasan Jumlah Penumpang Kapal/Pesawat dalam pelayanan Arus Mudik/balik Lebaran 1445 H di BKK kelas II Sorong Tahun 2024



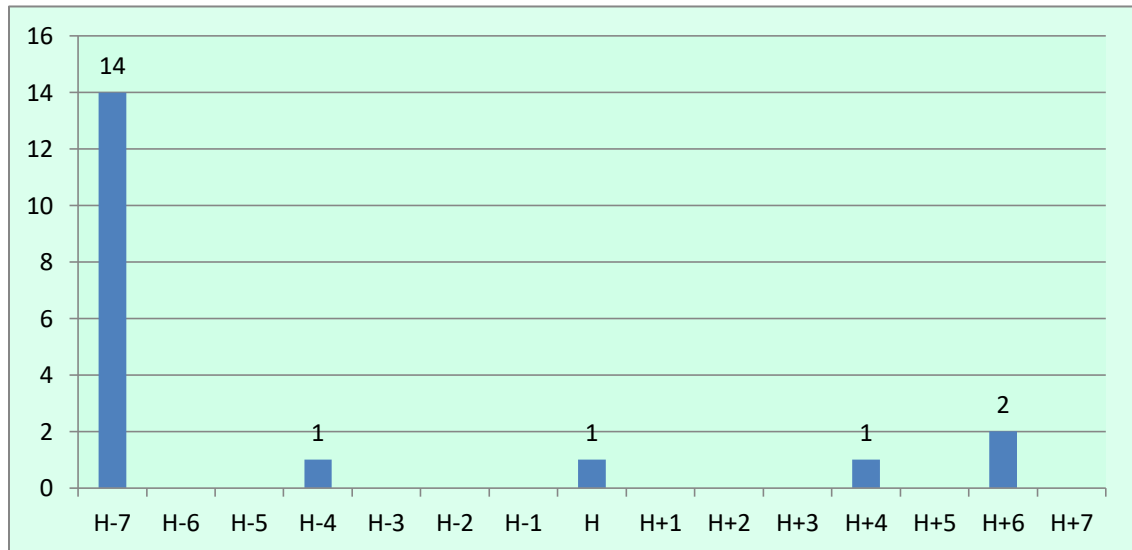
Dari grafik diatas selama arus mudik/balik lebaran dari tanggal 4 April 2024 s.d 17 April 2024, terlihat bahwa jumlah arus lalu lintas penumpang dipadati oleh penumpang pesawat sebanyak 43.938 orang. Untuk jumlah total penumpang selama arus mudik/balik lebaran sebanyak 82.952 orang, dengan rincian sebanyak 41.130 orang penumpang datang dan sebanyak 41.822 orang penumpang yang berangkat. Dari total arus lalu lintas penumpang jelas terlihat bahwa penumpang yang menggunakan transportasi pesawat lebih banyak dibandingkan yang menggunakan kapal.

Grafik 31. Distribusi Pengawasan Jumlah Penumpang Kapal/Pesawat dalam pelayanan Arus Mudik/balik Lebaran 1445 H di BKK kelas II Sorong Tahun 2024



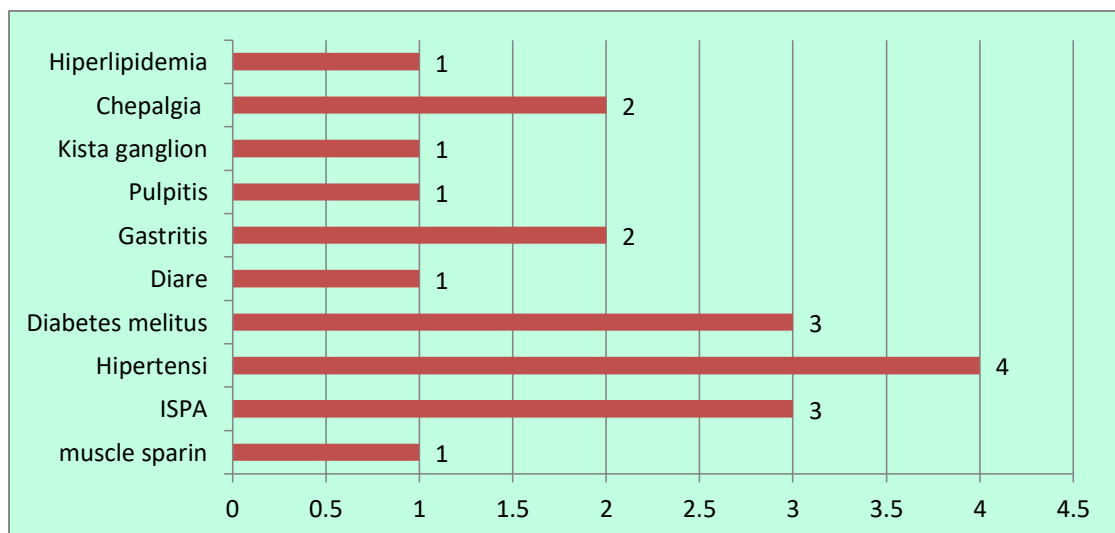
Dari grafik diatas terlihat bahwa data jumlah crew pesawat/Abk kapal terbanyak pada H-6 dengan jumlah 634 orang, dan yang terkecil jumlah crew pesawat/Abk kapal ada pada H-1 dengan jumlah 146 orang.

Grafik 32. Distribusi Jumlah kunjungan Pasien ke Pos Kesehatan Pada Pelayanan Arus Mudik/Balik Lebaran 1445 H Di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong



Dari grafik diatas terlihat bahwa data jumlah kunjungan pasien selama masa arus mudik/balik lebaran 1445 H/2024 terbanyak pada H-7 dengan jumlah 14 orang, nampak pada H-6 H-5 H-3 H-2 H-1 dan H+1 H+2 H+3 H+5 H+7 tidak ada kunjungan pasien pada hari tersebut.

Grafik 33. Distribusi pasien berdasarkan kejadian penyakit di pos kesehatan pada Pelayanan Arus Mudik/Balik Lebaran 1445 H Di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong

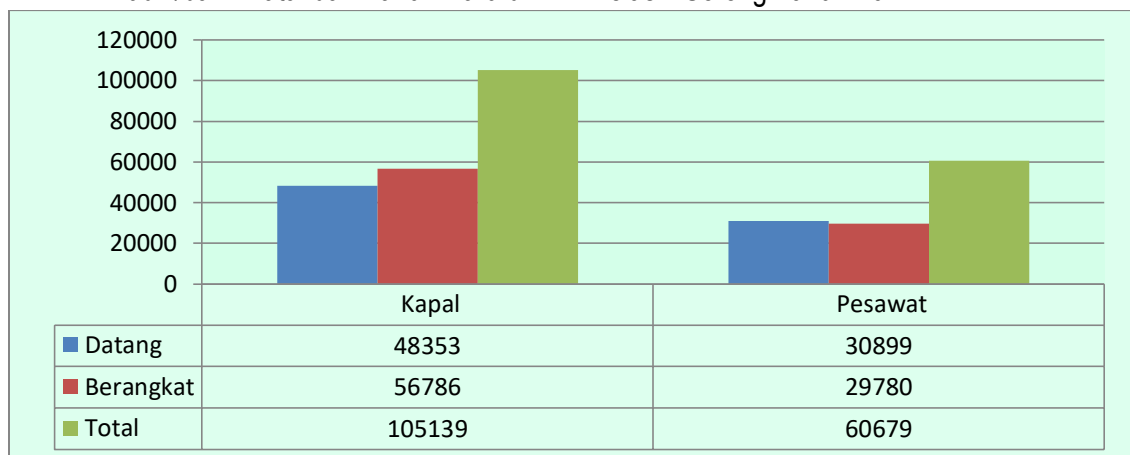


Dari grafik diatas terlihat bahwa kejadian penyakit pada pelayana arus mudik/balik lebaran terbanyak pada penyakit Hipertensi dengan jumlah 4 orang dan kemudian penyakit-penyakit terendah 1 sampai 2 orang.

- Arus Mudik dan Balik Hari Natal,Tahun Baru 2024.

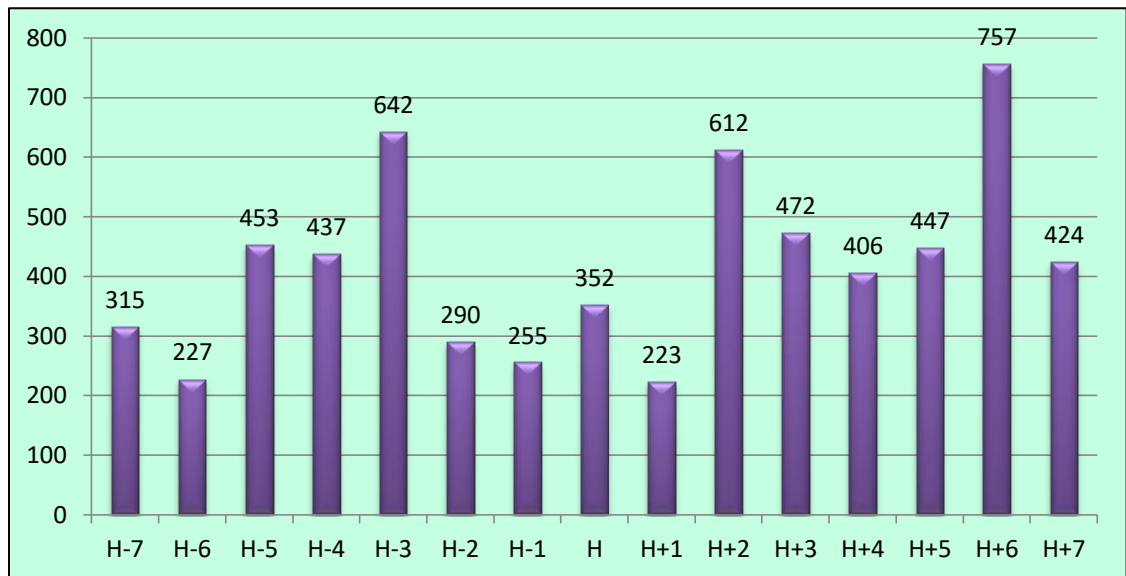
Dengan sasaran adalah terlindunginya pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi pesawat, kapal laut, serta awak pesawat/ awak kapal/ pengemudi dan masyarakat sekitar dari faktor risiko kesehatan yang diakibatkan situasi khusus perayaan Natal 2024 dan Tahun baru 2024. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masa arus mudik dan balik natal tahun 2024 dan tahun baru 2024 di posko pelabuhan laut dan posko Bandara Udara Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong dimulai sejak tanggal 24 Desember 2024 (H-7) sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 (H+7).

Grafik 34. Distribusi Pengawasan Jumlah Penumpang Kapal/Pesawat dalam pelayanan Arus Mudik/balik Natal dan Tahun Baru di BKK kelas II Sorong Tahun 2024



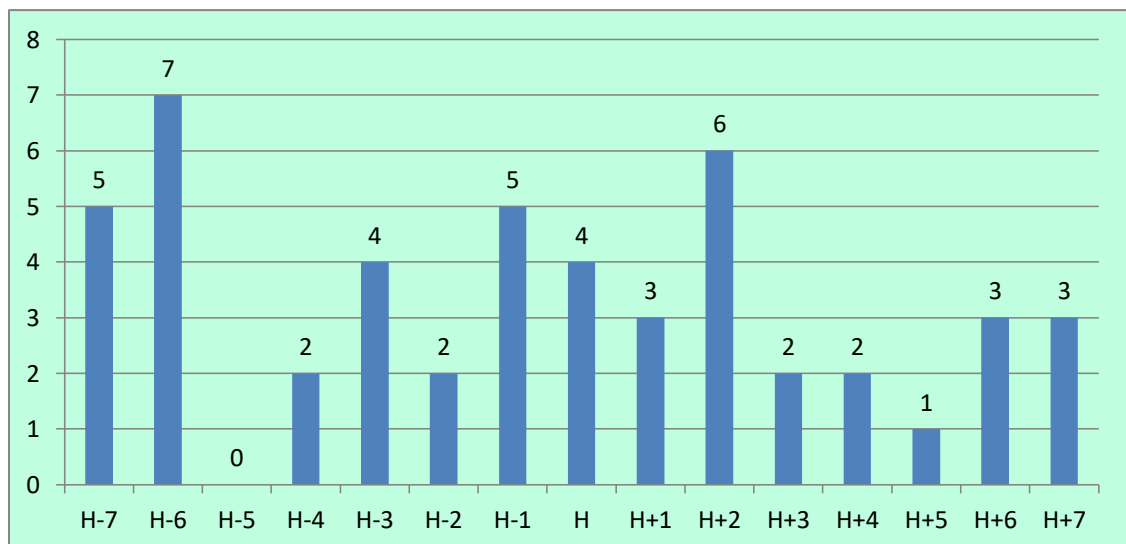
Dari grafik diatas selama arus mudik/balik Natal dan Tahun Baru dari tanggal 24 Desember 2024 s.d 08 Januari 2024 ,terlihat bahwa jumlah arus lalu lintas penumpang dipadati oleh penumpang kapal sebanyak 105.139 orang. Untuk jumlah total penumpang selama arus mudik/balik Natal dan TahunBaru sebanyak 165.818 orang, dengan rincian sebanyak 79.252 orang penumpang datang dan sebanyak 86.566 orang penumpang yang berangkat. Dari total arus lalu lintas penumpang jelas terlihat bahwa penumpang yang menggunakan transportasi kapal lebih banyak dibandingkan yang menggunakan pesawat. Hal ini dikarenakan biaya transportasi menggunakan kapal jauh relative murah dibandingkan dengan pesawat, sehingga lebih banyak pelaku perjalanan memilih menggunakan transportasi kapal.

Grafik 35. Distribusi Data Jumlah Crew Pesawat/Abk kapal dalam pelayanan Arus/MudikNatal dan Tahun Baru di BKK Kelas II Sorong



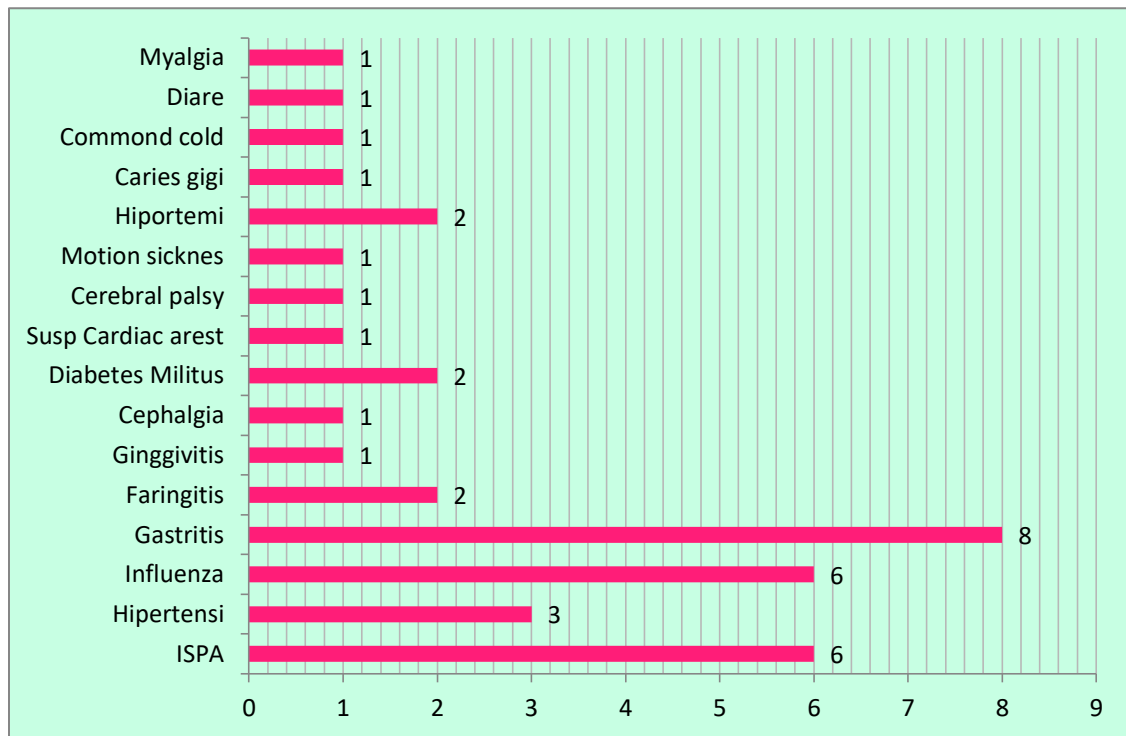
Dari grafik diatas terlihat bahwa data jumlah crew pesawat/Abk kapal terbanyak pada H+6 dengan jumlah 757 orang, dan yang terkecil jumlah crew pesawat/Abk kapal ada pada H+1 dengan jumlah 223 orang.

Grafik 36. Distribusi Jumlah kunjungan Pasien ke Pos Kesehatan Pada Pelayanan Arus Mudik/Balik Natal dan Tahun Baru di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong



Dari grafik diatas terlihat bahwa data jumlah kunjungan pasien selama masa arus mudik/balik Natal dan Tahun Baru terbanyak pada H-6 dengan jumlah 7 orang, dan pada H-5 tidak ada kunjungan pasien pada hari tersebut.

Grafik 37. Distribusi pasien berdasarkan kejadian penyakit di pos kesehatan pada Pelayanan Arus Mudik/Balik Natal dan Tahun Baru di Wilayah Kerja BKK Kelas II Sorong



Dari grafik diatas terlihat bahwa kejadian penyakit pada pelayana arus mudik/balik Natal dan Tahun Baru terbanyak pada penyakit Gastritis dengan jumlah 8 orang dan kemudian penyakit-penyakit lain terendah 1 sampai 2 orang.

4.6 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendukung penuh pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menerbitkan regulasi pelaksana melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Zona

Integritas di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Permenkes ini menjadi dasar pembentukan tim kerja serta pelaksanaan program-program reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Salah satu UPT strategis Kementerian Kesehatan yang memiliki peran penting dalam pembangunan Zona Integritas adalah Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Sorong. Sebagai institusi yang bertugas mengawasi lalu lintas alat angkut, orang, dan barang di pintu masuk negara, BKK Sorong berada di garis depan pelayanan publik yang harus berlangsung cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Dalam menghadapi tantangan kompleks serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi, BKK Sorong dituntut untuk terus meningkatkan kualitas layanannya melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap hal tersebut, BKK Sorong telah menetapkan Tim Kerja Zona Integritas dan Pelayanan Publik Tahun 2024 melalui Surat Keputusan Kepala BKK Sorong Nomor : HK.02.03/C.IX.5/3093/2024. Tim ini dibentuk untuk mengawal pelaksanaan pembangunan ZI dan pelayanan publik secara terstruktur dan berkelanjutan. Secara khusus, berdasarkan Diktum Keenam SK Kepala BKK Sorong Tahun 2024, Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas (Tim Kerja 5) memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan layanan publik yang informatif, responsif, dan berintegritas. Ruang lingkup tugas tim ini meliputi:

1. Penyediaan bahan media informasi publik;
2. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
5. Pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan;
6. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Pembentukan tim ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan BKK Sorong berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

B. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

1. Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Pada tahun anggaran 2024, telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bertujuan untuk memperkuat upaya lintas sektor dan internal dalam rangka pencegahan serta pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Kegiatan ini difokuskan pada upaya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan melalui penyusunan strategi, sinkronisasi kebijakan, serta evaluasi pelaksanaan program yang telah dijalankan baik di tingkat masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

Sebagai output dari kegiatan ini adalah menjadi dasar penting dalam perbaikan dan penguatan program-program kesehatan di masa mendatang. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pencegahan penyakit secara menyeluruh, terutama melalui perbaikan koordinasi lintas sektor. Selain itu, sinergi antarinstansi semakin kuat dengan komitmen bersama dalam mendukung kebijakan kesehatan publik.

2. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sistem pengawasan internal dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fokus utama kegiatan ini adalah memfasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat dan perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan instansi.

Pelaksanaan kegiatan mencakup penyusunan dan penyempurnaan mekanisme pelaporan pengaduan berbasis elektronik, sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat terkait saluran pengaduan yang tersedia, serta tindak lanjut awal atas laporan/pengaduan yang masuk. Selain itu, dilakukan pemantauan efektivitas saluran whistleblowing dan pelatihan petugas pengelola pengaduan.

Output:

- Tersedianya sistem/saluran pelaporan pengaduan yang aktif.
- Laporan rekapitulasi pengaduan masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti.
- Notulensi kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

Outcome:

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.
- Terbangunnya budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi.
- Terlindunginya hak-hak pelapor (whistleblower) dari tindakan represif.

3. Advokasi Hukum dan bantuan hukum

Advokasi dan bantuan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dalam konteks pemberian bantuan hukum kepada pegawai yang mengalami masalah hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam bekerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak hukum pegawai jika dalam melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan pengertian dan pemahaman kepada pegawai terkait advokasi hukum dan bantuan hukum.

4. Pengelolaan unit pengendalian gratifikasi

Kegiatan pengendalian gratifikasi adalah merupakan suatu rangkaian tindakan dan upaya untuk mencegah, mengawasi dan mengelola penerimaan gratifikasi oleh pegawai, terutama dalam konteks jabatan publik, agar tidak terjadi konflik kepentingan dan penyalagunaan wewenang. Output dan outcome dari kegiatan ini adalah menghindari pegawai dari potensi korupsi dan penyalagunaan wewenang serta berintegritas dalam menjalankan tugas.

5. Pelayanan Kesehatan dan Donor Darah Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN)

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tahun 2024, BKK Sorong menyelenggarakan kegiatan Donor Darah sebagai salah satu kepedulian terhadap masyarakat kota sorong yang membutuhkan transfusi darah di Rumah Sakit.

Kegiatan ini dilaksanakan berkerja sama dengan Balai Karantina Indonesia dan PMI Kota Sorong. Output dan outcome dari kegiatan ini adalah membantu menyelamatkan nyawa orang lain dan memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat pendonor.

6. Website dan Buletin

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis instansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media cetak. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyediakan saluran komunikasi resmi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat, baik secara digital melalui website maupun dalam bentuk cetak melalui buletin berkala. Website yang dikembangkan berfungsi sebagai pusat informasi publik terkait program, kegiatan, kebijakan, serta capaian instansi, yang di-

update secara berkala agar tetap relevan dan informatif. Selain itu, buletin diterbitkan secara berkala minimal empat kali dalam setahun dan didistribusikan ke berbagai instansi mitra serta titik-titik layanan publik, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap internet.

Pelaksanaan kegiatan ini mencakup beberapa tahapan penting, yakni: pengembangan dan pemeliharaan sistem website yang responsif dan ramah pengguna, perancangan konten dan desain buletin, proses pencetakan, hingga distribusi kepada masyarakat dan stakeholder. Selain itu, dilakukan juga pemantauan terhadap tanggapan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, yang nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Sebagai hasil dari kegiatan ini, telah tersedia website resmi instansi yang aktif dan terkelola dengan baik, serta terbit minimal empat edisi buletin yang telah didistribusikan ke sasaran yang ditentukan. Laporan distribusi dan tanggapan masyarakat terhadap media informasi yang disediakan juga telah disusun sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Adapun outcome yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi yang bersifat publik, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik melalui media komunikasi yang disediakan. Dengan adanya saluran informasi resmi ini, tercipta pula komunikasi dua arah antara instansi dan masyarakat, serta tersedianya dokumentasi kinerja dan kegiatan instansi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

7. Diseminasi/promosi informasi kegiatan

Kegiatan ini merupakan fondasi utama dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang menyeluruh dan sistematis di lingkungan instansi. Fokus utama kegiatan adalah memperkuat tata kelola informasi publik melalui pembenahan regulasi internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan monitoring terhadap pemenuhan hak publik atas informasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan proses evaluasi terhadap standar layanan informasi publik yang telah berjalan di unit-unit pelaksana, serta pembaruan daftar informasi publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan terkini. Output dan outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja layanan informasi publik yang lebih transparan dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat, meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi, serta terciptanya budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

8. Penyusunan dan Reviu dan Analisis Beban kerja, peta dan informasi jabatan

Sebagai bagian dari penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Sorong pada tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan penyusunan dan reviu Analisis Beban Kerja (ABK), Peta Jabatan, dan Informasi Jabatan. Kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata unit kerja.

Sejalan dengan upaya reformasi birokrasi serta transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, penyusunan ABK dan peta jabatan dilakukan untuk:

- Mengukur beban kerja riil yang dihadapi oleh setiap timkerja, berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif;
- Mengevaluasi kesesuaian jumlah dan distribusi pegawai, untuk menghindari ketimpangan beban kerja dan tumpang tindih peran;
- Menyesuaikan struktur jabatan dengan kebutuhan organisasi, khususnya dalam menghadapi dinamika lalu lintas internasional dan risiko kekarantinaan kesehatan yang kompleks;
- Mendokumentasikan informasi jabatan secara sistematis untuk mendukung pengembangan karier ASN dan pemetaan kompetensi.

Output:

- Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) terkini untuk setiap unit struktural dan fungsional di BKK Sorong
- Peta Jabatan organisasi hasil pemutakhiran sesuai kebutuhan fungsi kekarantinaan.
- Dokumen Informasi Jabatan yang lengkap, mencakup uraian tugas, tanggung jawab, indikator kinerja, serta kompetensi yang dibutuhkan.

Outcome:

- Optimalisasi distribusi tugas dan tanggung jawab pegawai, sehingga masing- masing unit bekerja sesuai kapasitas dan fungsinya secara efektif.
- Efisiensi penggunaan SDM dengan menyesuaikan jumlah personel berdasarkan analisis kebutuhan kerja aktual.

- Dasar pengambilan keputusan strategis dalam perencanaan kebutuhan pegawai, rotasi/mutasi, pengembangan kompetensi, dan penataan organisasi.
- Mendukung transformasi kelembagaan menuju organisasi modern yang adaptif terhadap beban dan risiko operasional.

9. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPT

Pada tahun 2024, Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Sorong telah melaksanakan kegiatan strategis berupa penyusunan dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah koordinasinya. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya peningkatan tata kelola organisasi dan penguatan mutu layanan kekarantinaan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, BKK Sorong berhasil menyusun dan merevisi sebanyak 163 SOP, yang mencakup seluruh aspek operasional, mulai dari prosedur pemeriksaan dokumen kesehatan internasional, pengawasan sanitasi alat angkut, pengambilan sampel laboratorium, hingga tata cara respon terhadap kejadian luar biasa (KLB) di pintu masuk negara. Penyusunan SOP ini dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dengan melibatkan unit teknis, fungsional tertentu, serta pemangku kepentingan internal agar dokumen yang dihasilkan bersifat aplikatif, akurat, dan sesuai kebutuhan lapangan.

Setiap SOP juga dilengkapi dengan manual implementasi yang berfungsi sebagai panduan teknis operasional di tingkat pelaksana, sehingga memudahkan proses sosialisasi dan monitoring pelaksanaan SOP di masing-masing unit kerja.

Output:

- 163 dokumen SOP UPT yang tersusun lengkap, valid, dan terdokumentasi dengan baik.
- Manual implementasi SOP yang dapat dijadikan rujukan kerja teknis harian bagi pegawai.

Outcome:

- Peningkatan kualitas layanan kekarantinaan di semua lini pelayanan melalui prosedur kerja yang lebih konsisten dan terdokumentasi.
- Peningkatan kepatuhan prosedural dalam pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk di area pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas negara.
- Penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja unit pelaksana melalui standar baku yang jelas dan dapat diaudit.

10. Penyusunan Profil

Pada tahun 2024, Balai Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Sorong telah melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen profil kelembagaan sebagai bagian dari upaya penguatan identitas organisasi serta transparansi informasi publik. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan memperbarui profil resmi BKK Sorong yang mencerminkan tugas, fungsi, struktur organisasi, capaian kinerja, serta kontribusi institusi dalam menjaga kesehatan di wilayah pintu masuk negara. Penyusunan profil dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data faktual yang diperoleh dari unit-unit kerja terkait. Dokumen ini disusun dalam format naratif yang komunikatif, dilengkapi dengan elemen visual seperti grafik, infografis, dan foto dokumentasi kegiatan, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan internal maupun eksternal, termasuk sebagai bahan sosialisasi, promosi institusi, dan laporan akuntabilitas publik.

Output:

- Dokumen Profil BKK Tanjung Priok yang lengkap dan terstruktur, mencakup:
- Sejarah dan dasar hukum pembentukan BKK
- Struktur organisasi dan uraian tugas
- Program dan kegiatan strategis
- Data kinerja dan statistik layanan
- Capaian utama dan inovasi kelembagaan
- Informasi pelayanan publik dan layanan pengaduan

Outcome:

- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi melalui dokumentasi profil yang informatif dan mudah diakses.
- Penguatan citra kelembagaan sebagai institusi yang profesional dan adaptif terhadap dinamika kekarantinaan kesehatan nasional dan global.
- Ketersediaan dokumen referensi resmi

11. Pelatihan Content Creator Guideline

Dalam rangka memperkuat kapasitas petugas, Balai Kekarantinaan Kesehatan Sorong mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pelatihan Content Creator Guideline yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kominfo Jakarta Barat. Pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan pegawai untuk membuat konten yang menarik dalam melakukan dokumentasi kegiatan kedinasan secara mandiri, kreatif, dan efektif diberbagai platform digital.

Output dan outcam dari pelatihan ini adalah Meningkatkan ketrampilan pegawai dalam menguasai teknik dan strategi dalam pembuatan konten dan Mengembangkan kreativitas pegawai

4.7 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ADMINISTRASI DAN UMUM / DUKUNGAN MANAJEMEN

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang pegawai berhak mendapatkan gaji beserta tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain gaji pokok, yang diterima oleh pegawai meliputi tunjangan suami/istri PNS, tunjangan anak, tunjangan struktural apabila menjabat sebagai struktural, tunjangan fungsional apabila menjabat sebagai pegawai teknis fungsional, tunjangan beras, tunjangan uang makan, tunjangan umum (gaji ke-13 dan 14), tunjangan kinerja dan belanja uang lembur. Pada tahun 2024, *Input* untuk alokasi pagu untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp6.054.352.000,-. *Outputnya* yaitu tercapainya realisasi pembayaran gaji dan tunjangan Tahun 2024 sebesar Rp 6,017,667,843,- (99,39%).

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Dukungan terhadap penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran juga dibutuhkan agar penyelenggaraan operasional perkantoran dapat dilaksanakan tanpa kendala-kendala sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi efisien dan efektif serta dapat memberikan hasil yang optimal.

Keperluan sehari-hari perkantoran meliputi: air minum untuk pelayanan, Honor PPNP, Lembur hari kerja dan hari libur non PNS (induk/wilker). Kebutuhan sehari-hari perkantoran, konsumsi, percetakan dokumen ketatausahaan, tinta fotocopy, pembayaran outsourcing tenaga satuan pengamanan, petugas kebersihan, supir, nahkoda kapal, pranata komputer. Sedangkan dukungan terhadap penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi langganan daya dan jasa meliputi: listrik, telepon dan air, paket internet wilker, paket internet pelayanan, c-panel, langganan internet kantor induk, dan google storage, biaya langganan akses dan caller ID, pemeliharaan server dan jaringan internet (LAN). Pemeliharaan Kantor (gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin) meliputi: gedung kantor tidak bertingkat dan rumah jabatan, pemeliharaan halaman gedung kantor dan

rumah jabatan, pemeliharaan gedung kantor bertingkat, pemeliharaan peralatan dan mesin (pemeliharaan inventaris kantor, printer, PC, AC, Genset, APAR, mesin photocopy, lift, peralatan fungsional, Pemeliharaan pemeliharaan alat kesling, pemeliharaan kendaraan roda 4, dan 2, perpanjang STNK roda 4 dan 2. Pembayaran terkait operasional kantor meliputi : belanja daya tahan tubuh pegawai, pemeriksaan kesehatan pegawai, honor pengelola keuangan, pakaian dinas pegawai dan kelengkapannya, honor UAKPA/UAKPB, honor administrasi BMN, honor penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah, sewa gedung wilker, sewa kendaraan operasional.

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 3,523,337,000,-. *Outputnya* yaitu kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran berjalan lancar dan telah terealisasi sebesar Rp 3.438.639.234,- (97.60%).

3. Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Ditjen P2P

Komponen dalam Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Ditjen P2P ada 1 sub komponen yaitu: Diklat/seminar/ kursus dukungan manajemen

a. Belanja Jasa Lainnya

Kegiatan ini terdiri dari biaya kontribusi dalam rangka pelaksanaan Diklat/seminar/ kursus dukungan manajemen.

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikan sebesar Rp. 11.800.000,-.

Output Pembayaran biaya kontribusi kegiatan diklat sebesar Rp. 10.250.000,- atau 86.86%.

b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Kegiatan ini terdiri dari belanja uang harian, uang representative, uang penginapan dan transport untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian.

Input dari kegiatan ini yaitu alokasi anggaran sebesar Rp. 23.560.000,-.

Output Pembayaran perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 21.944.820,- atau 93.14 %

4. Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen

Komponen dalam Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen ada 3 sub komponen yaitu (Penyusunan E-Renggar, Penyusunan RKAKL dan Pembahasan dan Penelaahan usulan dokumen perencanaan dan revisi anggaran.

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Kegiatan ini terdiri dari belanja uang harian, uang representative, uang penginapan dan transport untuk kegiatan perencanaan dan penganggaran. *Input* dari kegiatan ini yaitu alokasi anggaran

sebesar Rp.103.610.000,- dan Output dari kegiatan ini yaitu realisasi anggaran sebesar Rp.102.640.348 atau 99.06%.

5. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Program

Komponen dalam Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Program ada 4 sub komponen yaitu:

a. Penyusunan Laporan Tahunan Satker

Kegiatan ini terdiri dari pengadaan Belanja bahan kegiatan berupa penjilidan dan ATK

b. Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program P2P

Kegiatan ini terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa berupa Transport, uang harian dan penginapan untuk kegiatan Evaluasi program

c. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa berupa Transport, uang harian dan penginapan untuk kegiatan desk LAKIP dan perjanjian kinerja

d. Evaluasi SAKIP

Kegiatan ini terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa berupa Transport, uang harian dan penginapan untuk kegiatan Desk Evaluasi SAKIP dengan Tim Eselon 1 dan Itjen.

Input kegiatan ini yaitu alokasi anggaran sebesar Rp. 97.190.000,-.

Output dari kegiatan ini adalah Realisasi anggaran sebesar Rp. 96.685.741,- atau 99.48%

6. Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P

Komponen dalam pengelolaan keuangan Ditjen P2P ada 2 sub komponen yaitu :

a. Penyusunan Laporan Keuangan

Kegiatan ini terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa berupa Transport, uang harian dan penginapan untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan Semester 1, Triwulan III dan Tahunan dengan Tim Eselon 1.

b. Pengelolaan dan pelaporan PNB

Kegiatan ini terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa berupa Transport, uang harian dan penginapan untuk kegiatan penyusunan target / pagu PNB dengan Tim Eselon 1

Input kegiatan ini yaitu alokasi anggaran sebesar Rp. 53.947.000,-.

Output kegiatan ini yaitu realisasi anggaran sebesar Rp. 52.195.920,- atau 96.75%

7. Penyelenggaraan Kearsipan

Komponen dalam penyelenggaraan kearsipan ada 1 Sub komponen yaitu :

Penyusunan Arsip di Lingkungan Ditjen P2P.

Kegiatan ini terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa berupa Transport, uang harian dan penginapan untuk kegiatan penyusunan arsip.

Input kegiatan ini yaitu alokasi anggaran sebesar Rp. 26.620.000,-.

Output kegiatan ini adalah realisasi anggaran sebesar Rp. 26.486.025,- atau 99.50%.

4.8 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Target penerimaan PNBP BKK Sorong tahun 2024 sebesar Rp 749.035.000,- dan telah tercapai sebesar Rp 937.100.000,- atau 125 % dengan rincian tiap bulannya sebagai berikut:

- a. COP (Certificate of Pratique)
- b. SSCEC
- c. SSCC
- d. Buku Kesehatan Kapal
- e. PHQC
- f. Sertifikat Keterangan OMKABA
- g. Sertifikat Obat dan Alat P3K
- h. Buku ICV
- i. Pemeriksaan dan Pengobatan
- j. Surat Izin Pengangkutan Jenazah
- k. Surat Izin Pengangkutan Orang Sakit
- l. Surat Izin Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
- m. Sertifikasi Izin Penyelenggara Tindakan Penyehatan Alat Angkut Kapal
- n. Vaksin Yellow Fever
- o. Vaksin Meningitis

Target penerimaan PNBP BKK Sorong tahun 2024 sebesar Rp 749.035.000,- dan telah tercapai sebesar Rp 937.100.000,- atau 125 %.

4.9 PENCAPAIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKK Sorong memiliki delapan indikator kinerja. Pada tahun 2024, pelaksanaan kegiatan BKK Sorong telah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 15. Hasil Pencapaian Kinerja BKK Sorong Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	Indeks Deteksi Factor Risiko Penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0,93	0,93	100%
2	Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan	99%	100%	101,01%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara	0,97	0,97	100%
4	Nilai Kinerja Anggaran	90	97,77	108,63%
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	95,94	99,99%
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	78	82,27	105,47%
7	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	95%	100%	105,26%
8	Persentase Realisasi Anggaran	96%	97,81%	102,95%
Rata-Rata Persentase Capaian				102,91%

4.10 REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Selain itu reformasi birokrasi merupakan penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu poses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurus segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Reformasi Birokrasi di lingkungan BKK Sorong pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional

dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai dan kode etik pegawai.

Budaya Anti Korupsi di BKK Sorong sering disuarakan baik dari pimpinan dan staf, perlahan namun pasti, perubahan-perubahan kecil terjadi. Seiring dengan terus disosialisasikannya budaya anti korupsi di lingkungan BKK Sorong dan juga kebijakan pimpinan untuk menciptakan BKK Sorong yang bebas dari korupsi serta komitmen berupa penandatanganan pakta integritas dari segenap unsur yang ada. Sejak tahun 2022 hingga saat di tahun 2025 telah terbentuk tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

4.11 PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Sepanjang tahun 2024 Balai Kekarantinaan Kesehatan Sorong mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya:

1. Tanda Penghargaan dari Kemenkes RI sebagai UPT dengan Kepatuhan Interaksi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Tahun 2024.
2. Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Peringkat Ketiga Satuan Kerja dengan Jumlah Invoice Digipay Satu Terbanyak Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong Periode Triwulan III Tahun 2024.
3. Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Satuan Kerja Terbaik dalamj Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.
4. Piagam Penghargaan dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C. Sorong atas Partisipasi Luar Biasa dalam Peningkatan Perekonomian Nasional Sebagai Modal Transportasi Dukungan Ekspor.

Gambar 2. Piagam Penghargaan BKK Sorong Tahun 2024





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong telah merealisasikan program dan kegiatan pada tahun 2024, dimana capaian sasaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 yaitu “Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah”. Rata rata capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 92,94%, dimana dari delapan indikator kinerja empat indikator telah mencapai target dan empat indikator masih di bawah target, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/plbdn tercapai 0,93 dari target 0,93 dengan persentase capaian kinerja 100%;
2. Indikator persentasi faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tercapai 100% dari target 99% dengan persentase capaian kinerja 101,01%;
3. Indikator Indeks pengendalian faktor resiko di pintu masuk negara tercapai 0,97 dari target 0.97 dengan persentase capaian kinerja 100%;
4. Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tercapai 97,77 dari target 90 dengan persentase capaian kinerja 108,63%;
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tercapai 95,94 dari target 96 dengan persentase capaian kinerja 99,99%;
6. Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker tercapai 82,27 dari target 78 dengan persentase capaian kinerja 105,47%;
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya, tercapai 100% dari target 95% sehingga capaian kinerjanya 105,26%.
8. Persentase Realisasi Anggaran, tercapai 97,81% dari target 96% sehingga capaian kinerjanya 101,88%.
9. Persentase capaian rata-rata pada tahun 2024 sebesar 102,91%.

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan BKK Kelas II Sorong pada tahun 2024 diberikan pagu anggaran anggaran Program P2P sebesar = Rp. 12.243.373.000,- dengan jumlah realisasi Anggaran Program P2P Tahun 2024 sebesar Rp. 11.926.761.816,- (97,81%). Faktor

keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 yaitu tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adanya dukungan dari pimpinan, stake holder terkait dan dukungan masyarakat Pelabuhan/bandara yang telah berperan dalam mendukung capaian indikator, optimalisasi sumber daya manusia yang ada melalui peningkatan kapasitas SDM, sarana prasarana pendukung, adanya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala sehingga permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat diatasi, serta komitmen dengan instansi Lintas Sektor/Lintas Program melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi.

5.2 SARAN-SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan atas hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2018 diantaranya adalah:

1. Mengoptimalkan penggunaan thermometer digital di Pelabuhan wilayah kerja BKK Kelas II Sorong.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung khususnya kendaraan ambulance standar karantina dan kendaraan operasional vektor untuk menunjang kegiatan deteksi faktor risiko dipintu masuk negara.
3. Mengoptimalkan pelayanan petugas medis/paramedis yang ada sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
4. Menganalisa kembali terhadap beban kerja sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam pengusulan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) baik medis maupun paramedis di tahun berikutnya untuk penempatan di masing-masing wilayah sesuai kebutuhan sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan lebih optimal.
5. Mengusulkan penghapusan peralatan laboratorium lingkungan dan entomologi yang telah rusak berat untuk selanjutnya dilakukan pengusulan pengadaan pada anggaran tahun berikutnya.
6. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait di wilayah Pelabuhan untuk pembentukan forum Pelabuhan sehat di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong.
7. Mengusulkan penambahan SDM kesehatan baik melalui formasi CPNS umum maupun menambah tenaga PPPK.
8. Mengoptimalkan SDM Kesehatan yang ada dalam melakukan upaya pengendalian faktor risiko di wilayah kerja BKK Kelas II Sorong.

9. Melakukan pengendalian/penyemprotan lalat secara rutin setiap bulan di lokasi pembuangan sampah sementara mengacu pada hasil survey vector dan binatang pembawa penyakit.
10. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor di Pelabuhan dan Bandara dalam mengatur pengelolaan sampah untuk menekan perkembangan Posoan lalat.
11. Melakukan koordinasi dengan tokoh Masyarakat dan pemberian KIE tentang pentingnya pengendalian vector penyakit sebelum tindakan.
12. Advokasi kepada pihak pasar terkait dengan pengelolaan sampah sesuai standar dengan tidak menimbun sampah basah >24 jam serta melakukan pengendalian vector lalat secara rutin.
13. Diseminasi informasi hasil pemeriksaan TPM kepada pengelola Pelabuhan terkait dengan factor risiko konstruksi bangunan TPM sehingga menjadi pertimbangan perencanaan pengelola dalam memperbaiki konstruksi bangunan TPM pada tahun-tahun berikutnya.
14. Pengusulan anggaran pemeriksaan sampel lingkungan (air bersih dan makanan) di laboratorium terpadu terdekat dengan lokasi BKK Kelas II Sorong.
15. Menganalisa kembali terhadap beban kerja sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam pengusulan SDM di tahun berikutnya.
16. Pengusulan fasilitas ambulans karantina untuk mendukung system kewaspadaan dini di wilayah kerja.
17. Pengusulan anggaran pemeriksaan sampel lingkungan (air bersih dan makanan) di laboratorium terpadu terdekat dengan lokasi BKK Kelas II Sorong.
18. Mengupayakan proses kegiatan dan penagihan / pencairan anggaran dilaksanakan pada bulan yang sama sehingga tidak terjadi GAP antara realisasi output.
19. Mengupayakan Optimalisasi Penyerapan Anggaran berupa belanja barang dan belanja modal sesuai dengan RPK dan RPD Satker.